



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**

**RENJA  
RENCANA KERJA  
TAHUN 2022**



**Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**  
Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo No. 34 Kabupaten Pemalang  
Telp. ( 0284 ) 321042



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor );
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2009 Nomor 1);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2013 Nomor 9);

12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMATANG TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2022.
2. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
3. Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 2

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
2. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pematang
  - b. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pematang
  - c. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pematang
  - d. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pematang
  - e. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pematang
  - f. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pematang
  - g. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kabupaten Pematang
  - h. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang

- i. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang
- j. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
- k. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang
- l. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang
- m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
- n. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang
- o. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang
- p. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang
- q. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang
- r. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
- s. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
- t. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang
- u. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang
- v. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang
- w. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang
- x. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
- y. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
- z. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang
- aa. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Pemalang
- bb. Rencana Kerja Kecamatan Pemalang
- cc. Rencana Kerja Kecamatan Taman
- dd. Rencana Kerja Kecamatan Petarukan
- ee. Rencana Kerja Kecamatan Comal
- ff. Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Bodeh

- hh. Rencana Kerja Kecamatan Ulujami
- ii. Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang
- jj. Rencana Kerja Kecamatan Randudongkal
- kk. Rencana Kerja Kecamatan Warungpring
- ll. Rencana Kerja Kecamatan Moga
- mm. Rencana Kerja Kecamatan Pulosari
- nn. Rencana Kerja Kecamatan Belik
- oo. Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap  
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap  
Ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 30







**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 050/1656 /PUTR**

**TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PEMALANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2022, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 serta sebagai acuan seluruh Satuan Kerja dalam penyesuaian target kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD Kabupaten Pemalang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026;
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPUTR Kabupaten Pemalang;
21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural DPUTR Kabupaten Pemalang;
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium pada DPUTR Kabupaten Pemalang;
23. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pemeliharaan Jalan dan Irigasi pada DPUTR Kabupaten Pemalang;

24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang,

Pada Tanggal : 30 September 2021

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PEMALANG

  
**MOHAMAD SALEH, S.T., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19730704 199903 1 007

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayahNYA, sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2022.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2022 yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 sampai dengan triwulan IV; hasil rasionalisasi, realokasi dan *refocusing* anggaran untuk menanggulangi Covid-19; serta perubahan rencana kerja dan pendanaan.

Renja disusun untuk memberikan gambaran arah kebijakan, tujuan, sasaran, program kerja, serta kegiatan organisasi yang akan dicapai, setelah disesuaikan dengan dinamika yang terjadi selama tahun berjalan.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang ini menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PEMALANG



**MOHAMAD SALEH, S.T, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730704 199903 1 007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
SK KEPALA DPUTR KAB. PEMALANG	
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I. PENDAHULUAN.....	5
I.1 Latar Belakang.....	5
I.2 Landasan Hukum .....	6
I.3 Maksud dan Tujuan .....	9
I.4 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PD TAHUN LALU.....	11
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	11
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	58
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	66
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	86
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	108
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DPUTR .....	133
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah.....	133
III.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	133
III.1.2 Telaahan terhadap Kebijakan Prov. Jateng .....	134
III.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.....	146
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPUTR.....	168
IV.1 Program dan Kegiatan.....	168
BAB V. PENUTUP.....	183

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja DPUTR dan Pencapaian Renstra DPUTR S/D Tahun 2021.....	13
Tabel II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.....	59
Tabel II.3	Perbandingan Hasil Nilai Sakip Tahun 2019 dan 2020.....	65
Tabel II.4	Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	69
Tabel II.5	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPUTR Kab. Pemalang	71
Tabel II.6	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pemalang.....	88
Tabel II.7	Program / Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pemalang.....	108
Tabel III.1	Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan DPUTR Tahun 2016-2022.....	149
Tabel III.2	Rumusan Program dan Kegiatan DPUTR Kab. Pemalang Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 DPUTR Kab.Pemalang.....	154
Tabel IV.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.....	169



# BAB I PENDAHULUAN

## I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU TR) Kab. Pematang Jaya merupakan dokumen perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada Renstra dan RKPD. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 adalah tahap awal penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2026, disusun berdasarkan kerangka kebijakan mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Bupati terpilih yaitu : “***Terwujudnya Kabupaten Pematang Jaya yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni***”. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategis. Penyusunan Renja DPU TR dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja, dan
2. Tahap penyajian rancangan Renja.

Tahun 2022 merupakan tahun pemulihan ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang sangat berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, maka perlu langkah-langkah strategis yang dirumuskan dalam fokus pembangunan 2022.

Kabupaten Pemalang sebagai kota yang sedang berkembang dengan dinamika pembangunan yang dinamis terus berpacu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kunci peningkatan dan pencapaiannya terletak dari sistem perencanaan yang handal. Pelaksanaan pembangunan akan sesuai harapan apabila melalui perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan tujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pemerintah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang sebagai Unit Organisasi yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dalam menyikapi perubahan situasi dan kondisi akibat dampak Covid-19 perlu melakukan penyesuaian dan penajaman kebijakan pembangunan serta optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsinya yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Rencana Kerja PD) Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini telah mendasari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 - 2026 dan memperhatikan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 - 2026 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang kedepan.

## **I.2. Landasan Hukum**

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018 – 2038;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan PD Kabupaten Pemalang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 -2026;
24. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja DPUTR Kabupaten Pemalang;
25. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural DPUTR Kabupaten Pemalang;

26. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Peralatan dan Laboratorium pada DPUTR Kabupaten Pemalang;
27. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pemeliharaan Jalan dan Irigasi pada DPUTR Kabupaten Pemalang;
28. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022.

### **I.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2022 ini sebagai dasar rencana implementasi dan operasionalisasi tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dalam menyikapi perubahan situasi dan kondisi akibat dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada Tahun Anggaran 2022.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2022 adalah :

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi sekarang dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang;
2. Menjadi satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dalam menyikapi perubahan situasi dan kondisi akibat dampak Covid-19;
3. Untuk menjamin keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada tahun 2022 dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2021-2026;
4. Sebagai pedoman bagi unit kerja dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang untuk memberikan kontribusinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

### **I.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2022 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan



Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan Sistematika sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

## BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DPUTR TAHUN LALU

- II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu dan Capaian Renstra DPUTR Kab. Pematang
- II.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPUTR Kab. Pematang
- II.3. Hasil Evaluasi Sakip
- II.4. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPUTR Kab. Pematang
- II.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- II.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPUTR

- III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- III.2. Tujuan dan sasaran Rencana Kerja DPUTR Kab. Pematang

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPUTR

- IV.1. Program dan Kegiatan

## BAB V PENUTUP

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU

#### II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Lalu (2020) dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan. Sasaran tersebut dicapai dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan – kegiatan dengan uraian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Rencana Capaian Tahun 2022 dapat dilihat pada table II.1.

Pada Tahun 2021 DPUTR mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 174.257.929.000,-** (*Seratus tujuh puluh empat milyar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah*) dan realisasinya sebesar **Rp. 163.715.346.482,-** (*Seratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah*), Sehingga terdapat Silpa Rp.10.542.582.518,- (*Sepuluh milyar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu lima ratus delapan belas rupiah*). Adapun kegiatan yang tidak dapat terserap 100% yaitu :

1. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, pekerjaan Peningkatan Jalan Gejos – Tlagasana yang bersumber dana dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, disebabkan pemenang lelang gagal tanda tangan kontrak serta waktu pelaksanaan yang terlalu pendek hingga akhir tahun sehingga sangat beresiko dalam pengendalian mutu pekerjaan dan penyedia jasa tidak sanggup untuk menyelesaikan.

2. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, pada pekerjaan Rehabilitasi D.I. Jurugwang, D.I Lanjiladang, D.I. Siebeg yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam hal ini anggaran hanya terserap 80% dari pagu, akan tetapi untuk pekerjaan fisiknya mencapai 100%.
3. Sub Kegiatan Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perdesaan, pada pekerjaan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (Broncaptering) di Desa Warungpring Kec. Warungpring, Desa Ambowetan Kec. Ulujami, Desa Mojo Kec. Ulujami, Desa Jrasah Kec. Taman, Desa Suru Kec. Bantarbolang, Desa Sikasur Kec. Belik, Desa Majakerta Kec. Watukumpul, Desa Kejene Kec. Randudongkal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam hal ini anggaran hanya terserap 80% dari pagu, akan tetapi untuk pekerjaan fisiknya mencapai 100%.
4. Sub Kegiatan Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di Kawasan perdesaan, pada pekerjaan Pembuatan sumur dangkal dan pompanisasi di Dusun Sipedang Desa Cawet Kec. Watukumpul dan Dusun Sikemplang Desa Watukumpul Kec. Watukumpul yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam kegiatan ini pekerjaan dilaksanakan tetapi tidak berhasil (air tidak keluar).

**Tabel II.1 :**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPUTR DAN**  
**PENCAPAIAN RENSTRA DPUTR s/d TAHUN 2020 KABUPATEN PEMALANG**

Nama Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar									
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dukungan terhadap kelancaran administrasi umum dan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.03.1.03.01.01.01	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	1.000 surat; Materai dan Benda Pos lainnya 610 bh	1000 surat	1000 surat	1000 Surat	100	1000 surat	1000 surat	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah no. rek telepon, no. rek listrik dan no. rek air yang dibayarkan tagihannya	6 Jenis Kebutuhan; 44 bh	4 Jenis	20 jenis	20 jenis	100	5 jenis	5 jenis	100
1.03.1.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas / Operasional yang dipelihara dan diperpanjang perijinannya	141 Unit	94 unit	119 Unit	40 Unit	100	122 Unit	117 Unit	95,90
1.03.1.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan Administrasi Keuangan yang disusun	6 Laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
1.03.1.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah gedung yang terpelihara kebersihannya	1 gedung kantor	9 gedung	9Unit Gedung	9Unit Gedung	100	8 Unit Gedung	8 Unit Gedung	100
1.03.1.03.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Persediaan ATK selama 1 Tahun	ATK 1 Pkt; Tinta Printer 45 botol; Catridge 30	16 jenis	16 Jenis	16 Jenis	100	32 Jenis	32 Jenis	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			bh; Memory stick 20 bh							
1.03.1.03.01.01.11	Penyediaan barang dan cetakan dan penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak; jumlah penggandaan	Barang cetakan 6 Jenis; Penggandaan 178.625 lembar	3 jenis	8 Jenis	8 Jenis	100	7 Jenis	7 Jenis	100
1.03.1.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara instalasi listrik / penerangannya	1 gedung kantor	9 gedung kantor	9Unit Gedung Kantor	9 Unit Gedung Kantor	100	9Unit Gedung Kantor	9 Unit Gedung Kantor	100
1.03.1.03.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kelengkapan upacara yang tersedia	kelengkapan upacara/bendera 10 bh; Mimbar 1; Karpas 10 m; rumbai-	2 jenis	3 Jenis	3 Jenis	100	4 Jenis	4 Jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			rumbai layos 8 bh							
1.03.1.03.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan makan dan minum yang tersedia	peralatan dapur/rak piring 3 bh; piring dan gelas 10 lusin; tabung gas 3 bh	3 jenis	2 Jenis	2 Jenis	100	3 Jenis	3 Jenis	100
1.03.1.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	buku bacaan dan peraturan perundang-undangan: 50 buah; surat kabar/majalah 3 eksemplar per hari	3.240 Eksemplar	3.240 Eksemplar	3.240 Eksemplar	100	2 Jenis	2 jenis	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman beserta pendukungnya yang tersedia	bahan bakar gas 50 bh; isi ulang air mineral 305 galon; makan dan minum rapat 600 dus; makan dan minum kegiatan dinas 1640 dus	8 jenis	8 Jenis	8 Jenis	100	2 Jenis	2 Jenis	100
1.03.1.03.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	perjalanan dinas dalam daerah gol IV,III,II,I= 121 OH, perjalanan dinas luar daerah	350 Kali	605 keg	605 keg	68,90	153 keg	153 keg	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			(semarang dan sekitarnya) = 170 OH, (jawa barat,DKI jakarta,jawa timur)= 66 OH							
1.03.1.03.01.01.19	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah gedung kantor yang terjaga keamanannya	1 gedung kantor Dinas dan 8 gedung UPPU	4 gedung	4 Unit Kantor	4 Unit Kantor	100	-	-	-
1.03.1.03.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dukungan terhadappeningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
1.03.1.03.01.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang	2 unit	4 unit; 2 dokumen;	1 unit; 2 dok; 7	1 unit; 2 dok; 7	100	12 unit;	12 unit;	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dibangun; Jumlah dokumen Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) yang disusun; Jumlah gedung kantor pemerintahan yang direhabilitasi; Jumlah Rumah Dinas yang terbangun; Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang terusun; Jumlah Dokumen Pendataan Bangunan Gedung Negara; Jumlah Rumah Dinas yang terehabilitasi; Jumlah Gudang Arsip yang terbangun		1 unit; 2 dok	unit; 4 unit; 1 dok; 1 dok; 4 unit; 1 unit	unit; 4 unit; 1 dok; 1 dok; 4 unit; 1 unit		4 dok 6 dok	4 dok 6 dok	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	8 Unit	2 unit	10 Unit	10Unit	100	1 Unit	1Unit	
1.03.1.03.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	1 paket	1 jenis	6 Jenis	6 Jenis	100	6 Jenis	6 Jenis	
1.03.1.03.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	Drone, GPS	2 jenis	1 Jenis	1 Jenis	100	1 Jenis	1 Jenis	
1.03.1.03.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang disediakan	Meja kerja 15 bh; Kursi kerja 15 bh	4 jenis	3 Jenis	3 Jenis	100	6 Jenis	6 Jenis	
1.03.1.03.01.02.11	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang disediakan	Laptop 4 bh; PC 1 bh; Printer A3 2 bh; Printer A4 6 bh	1 jenis	5 unit	5 unit	100	8 unit	8 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung kantor; Genset 1 Unit	9 unit	9 Unit	9 Unit	100	8 Unit	8 Unit	
1.03.1.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Bahan bakar minyak 2.500 ltr; kendaraan dinas/operasional 220 unit; suku cadang kendaraan dinas/operasional 18 kali unit; pelumas kendaraan dinas/operasional 40 kali unit	220 unit	112 unit	112 unit	100	122 unit	122 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pemeliharaan AC 20 unit; Layos 2 unit; Mesin telepon/fax 2 unit	5 jenis	5 Jenis	5 Jenis	100	2 Jenis	2 Jenis	
1.03.1.03.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah meubeleur kantor yang dipelihara	50 buah	10 unit	-	-	0	-	-	
1.03.1.03.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara	41 unit	130 unit	190 unit	190 unit	100	2 jenis	2 jenis	
1.03.1.03.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 gedung kantor dan 1 gedung UPPU	3 unit	2 Unit Gedung	2 Unit Gedung	100	2 Unit Gedung	2 Unit Gedung	
1.03.1.03.01.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Kompetensi</b>	<b>52%</b>	<b>40%</b>	<b>49%</b>	<b>49%</b>	<b>100</b>	<b>49%</b>	<b>49%</b>	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.01.05.04	Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti pelatihan pelaksanaan tupoksi SKPD	50 orang	50 orang	261 orang	261 orang	100	30 orang	30 orang	
<b>1.03.1.03.01.06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
1.03.1.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	2 laporan	3 laporan	3Laporan	3 Laporan	100	3Laporan	3 Laporan	
1.03.1.03.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran semester 1 dan 2 serta laporan inventarisasi BMD yang disusun	4 laporan	2 laporan	2Laporan	2Laporan	100	2Laporan	2Laporan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	5 laporan	5 laporan	5Laporan	5 Laporan	100	5Laporan	5 Laporan	
1.03.1.03.01.06.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan bulanan perkembangan kegiatan DPU TR yang disusun; Jumlah laporan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disusun; Jumlah laporan kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang disusun	48 laporan	12 Laporan, 4 Laporan, 4Laporan	12 Laporan, 4 Laporan, 4Laporan	12 Laporan, 4 Laporan, 4 Laporan,	100			
1.03.1.03.01.09	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Persentase jenis dokumen Perencanaan dan penganggaran yang tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.01.09.01	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Prosentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	2 dokumen, 1 website	0	100	100	0	-	-	
1.03.1.03.01.09.02	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang di susun	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	
<b>1.03.1.03.01.15</b>	<b>Program pembangunan jalan dan jembatan</b>	<b>Persentase jalan dalam kondisi baik; Persentase jembatan dalam kondisi baik</b>	<b>93%; 100%</b>	<b>49,31; 96,64%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>100</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	
1.03.1.03.01.15.01	Perencanaan pembangunan jalan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jalan yang disusun	14 dokumen	1 dokumen;	3 Dokumen	3 Dokumen	--	6 Dokumen	6 Dokumen	
1.03.1.03.01.15.03	Pembangunan jalan	Jumlah panjang jalan kabupaten yang dibangun	350 meter	200 meter	200 Meter	200 Meter	100	1000 Meter	1000 Meter	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.01.15.04	Perencanaan pembangunan jembatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jembatan yang disusun	8 dokumen	1 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	--	-	-	
1.03.1.03.01.15.05	Pembangunan jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	2 unit	2unit	1Unit	1Unit	66,67	3 Unit	3 Unit	
1.03.1.03.01.15.07	Peningkatan jalan	Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan	21.000 meter	16.500 meter	6.000 meter	6.000 meter	100	9.000 meter	9.000 meter	
1.03.1.03.01.15.08	Peningkatan jembatan	Jumlah jembatan kabupaten yang ditingkatkan	1 unit	4 Unit	12 Unit	12 Unit	100	3 Unit	3 Unit	
<b>1.03.1.03.01.16</b>	<b>Program tanggap darurat jalan dan jembatan</b>	<b>Persentase jalan dalam kondisi baik; Persentase jembatan dalam kondisi baik</b>	<b>93%; 100%</b>	<b>49,31%; 96,74%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.03.1.03.01.16.01	Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat	Panjang jalan kabupaten yang direhabilitasi dalam kondisi tanggap darurat	242 meter	-	-	-	100	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.01.16.02	Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat	Jumlah jembatan yang direhabilitasi dalam kondisi tanggap darurat	3 Unit	-	-	-	100	-	-	
<b>1.03.1.03.01.17</b>	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	<b>Persentase jalan dalam kondisi baik; Persentase jembatan dalam kondisi baik</b>	<b>93%; 100%</b>	<b>88%; 97%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
1.03.1.03.01.17.01	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Jalan	14 dokumen	4 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	13 dokumen	13 dokumen	
1.03.1.03.01.17.02	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemeliharaan Jembatan	8 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	-	-	
1.03.1.03.01.17.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara	17.750 meter	6.800 meter	15.000Meter	15.000 Meter	100	57.600 Meter	57.600 Meter	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.01.17.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihara	3 unit	5 unit	8 Unit	8 Unit	100	3 Unit	3 Unit	
1.03.1.03.01.19	<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	<b>Luas wilayah yang tertata</b>	<b>56 Ha</b>	<b>28 Ha</b>	<b>49 Ha</b>	<b>49 Ha</b>	<b>100</b>	<b>49 Ha</b>	<b>49 Ha</b>	
1.03.1.03.01.19.03	Pembangunan/Penataan Kawasan	Jumlah kawasan yang dibangun/ditata	1 Lokasi	3 unit	3kawasan	3kawasan	100	3kawasan	3kawasan	
1.03.1.03.01.20	<b>Program pembangunan rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong</b>	<b>Drainase dalam kondisi baik</b>	<b>71%</b>	<b>67,07%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>100</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	
1.03.1.03.01.20.02	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang direhabilitasi/dipelihara	6.000 meter	2.000 m	4.000 Meter	4.000 Meter	100	1667 Meter	1667 Meter	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.01.20.03	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monitoring pekerjaan	12 laporan	0	-	-	0	-	-	
1.03.1.03.01.20.04	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Dokumen perencanaan saluran drainase/gorong-gorong yang disusun	8.000 meter	2000 m	1 dokumen	1 dokumen	100	1222 meter	1222 meter	
<b>1.03.1.03.01.22.</b>	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b>	<b>Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik</b>	<b>75%; 100%</b>	<b>68,17%; 90,44%</b>	<b>73%</b>	<b>73%</b>	<b>108,21%; 100,49%</b>	<b>73%</b>	<b>73%</b>	
1.03.1.03.01.22.01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Jumlah dokumen perencanaan jaringan irigasi DAK 2021 dan perencanaan rehab bendung re-use	2 dokumen	1 dokumen	1 Dokumen ; 1 Dokumen	1 Dokumen ; 1 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.01.22.02	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum yang disusun	1 dokumen	3 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	
1.03.1.03.01.22.05	Perencanaan normalisasi saluran sungai	Jumlah dokumen perencanaan kajian longstorage dan system pompa kendali banjir di sungai srengseng; Jumlah dokumen perencanaan DED muara Sungai Srengseng	4 dokumen	4 dokumen	1Dokumen; 1Dokumen	1Dokumen; 1Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	
1.03.1.03.01.22.06	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	Panjang jaringan air bersih/air minum yang terbangun	52.000 m	11.000 meter (SR)	14.500 Meter	11.000 Meter	100	4008 meter	4008 meter	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.01.22.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang saluran irigasi yang dipelihara; Jumlah bangunan air yang dipelihara; Jumlah bendung yang dipelihara; Jumlah bangunan talang yang terpelihara; Panjang Saluran irigasi yang direhabilitasi ( DAK ); Jumlah bangunan air yang direhabilitasi ( DAK ); Jumlah bangunan air yang direhabilitasi	2.000 m	1.508 meter; 30 unit	6900 meter; 36 buah; 4 buah; 1 meter; 158meter ; 1 buah; 3 buah	6900 meter; 36 buah; 4 buah; 1 meter; 158 meter; 1 buah; 3 buah	100	9 unit; 1670 meter	9 unit; 1670 meter	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.01.22.14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Panjang sungai yang terpelihara	3.600 m	900 meter	1.900 m	1.900 m	100	11.800 m	11.800 m	
1.03.1.03.01.22.15	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Jumlah Surat Keputusan Bupati tentang Pola Tanam dan Tata Tanam yang disusun	1 dokumen	1 SK; 306 buku	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	
1.03.1.03.01.22.16	Pemberdayaan petani pemakai air	Rapatsosialisip emberdayaan P3A	150 orang; 100 meter	75 orang	-	-	100	-	-	
1.03.1.03.01.22.17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan monev kegiatan seksi pelaksanaan yang disusun		3 laporan	1 keg	1 keg	100	-	-	-
1.03.1.03.01.22.18	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Tanggap Darurat	Panjang jaringan irigasi yang terehabilitasi	12 kali;1 laporan	-	-	-	0	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dalam kondisi tanggap darurat								
1.03.1.03.01.22.19	Rehabilitasi Sungai Dalam Kondisi Tanggap Darurat	Panjang sungai yang terehabilitasi dalam kondisi tanggap darurat	170 meter	-	-	-	0	-	-	
1.03.1.03.01.24	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak; Cakupan pelayanan air limbah	95%; 80%	90,44%;	78 unit	78 unit	100	78 unit	78 unit	
1.03.1.03.01.24.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Jumlah pendampingan PAMSIMAS dan KOTAKU yang terlaksana	1.400 SR	6 laporan	17 dokumen	17 dokumen	100	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.01.24.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Jumlah IPAL Komunal, Sambungan Rumah dan Tangkiseptick yang dibangun	1 IPAL; 300 RT	7 unit, 250 SR; 6 unit; 80 SR	2 Unit, 60 SR dan 330 RT	2 Unit, 60 SR dan 330 RT	100	19 Unit	19 Unit	
1.03.1.03.01.24.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah monev kegiatan penyehatan lingkungan permukiman dan air minum yang dilakukan	1 laporan	6 laporan	-	-	100	-	-	
1.03.1.03.01.25	<b>Program pengaturan jasa konstruksi</b>	<b>Persentase jumlah izin usaha jasa konstruksi</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	
1.03.1.03.01.25.01	Sosialisasi dan desiminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan diseminasi peraturan	50 orang	100 orang	-	-	100	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	peraturan lainnya yang terkait	perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait								
1.03.1.03.01.25.02	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah penyedia jasa konstruksi yang diperpanjang ijinnya; Jumlah dokumen Rancangan Peraturan Daerah	50 penyedia; 1 buku	50 penyedia; 20 buku	50 Pemohon ; 1 dokumen	50 Pemohon ; 1 dokumen	100	52 dokumen	52 dokumen	
1.03.1.03.01.28	<b>Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya</b>	<b>Persentase tempat penampungan air baku dalam kondisi baik</b>	55%	40%	100%	100%	100	100%	100%	
1.03.1.03.01.28.02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan	Jumlah embung dan penampung	2 unit	1 unit	1 embung	1 embung	100	2 embung	2 embung	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	bangunan penampung air lainnya	air yang terpelihara								
1.03.1.03.01.28.05	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya	Jumlah peserta sosialisasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA	400 orang	80 orang	80 orang	80 orang	100	-	-	
1.03.1.03.01.28.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev Kegiatan bidang SDA yang disusun	1 laporan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	100	-	-	
1.03.1.03.01.28.08	Rehabilitasi Embung dan Bangunan Panampung Air Lainnya dalam Kondisi Tanggap Darurat	Jumlah embung/penampung air yang dipelihara dalam kondisi darurat	1 unit	1 unit	-	-	100	-	-	
1.03.1.03.01.28.10	Penyusunan sistem informasi sumber daya air	Prosentase pembuatan aplikasi E-Pengawasan Tahap I	1 aplikasi	1 aplikasi	100 %	100 %	100	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.01.28.11	Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air	Jumlah laporan monitoring Pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang disusun	1 laporan	3 laporan	-	-	100	-	-	
1.03.1.03.01.28.12	Perencanaan pembangunan pengaman pantai	Jumlah dokumen detail desain perencanaan pembangunan pengaman pantai yang disusun	1 dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-	
1.03.1.03.01.28.13	Pembangunan prasarana pengaman pantai	Jumlah prasarana pengaman pantai yang dibangun	4 unit	1 unit	-	-	<b>100</b>	<b>█</b>	<b>█</b>	
<b>1.03.1.03.01.2.9</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kewilayahan</b>	<b>Persentase infrastruktur skala UPPU wilayah yang terjaga kualitasnya</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	<b>100</b>	<b>30%</b>	<b>30%</b>	
1.03.1.03.01.29.01	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Panjang jalan kabupatendenga	500 meter	3.600 meter	2.100 m2	2.100 m2	100	100 m3	100 m3	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Secara Swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah I	ntingkatkerusakansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah I yang direhabilitasi/dipelihara								
1.03.1.03.01.29.02	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah II	Panjang jalan kabupatendengantingkatkerusakansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah II yang direhabilitasi/dipelihara	400 meter	5.700 meter	1.900 m2	1.900 m2	100	1.000 m2	1.000 m2	
1.03.1.03.01.29.03	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah III	Panjang jalan kabupatendengantingkatkerusakansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah III yang	400 meter	3.800 meter	1.900 m2	1.900 m2	100	1.040 m2	1.040 m2	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		direhabilitasi/dipelihara								
1.03.1.03.01.29.04	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah IV	Panjang jalan kabupatendengantingkatkerusakansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah IV yang direhabilitasi/dipelihara	400 meter	4.900 meter	1.200 m2	1.200 m2	100	1.050 m2	1.050 m2	
1.03.1.03.01.29.05	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah V	Panjang jalan kabupatendengantingkatkerusakansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah V yang direhabilitasi/dipelihara	500 meter	3.500 meter	4.130 m2	4.130 m2	100	900 m2	900 m2	
1.03.1.03.01.29.06	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola pada	Panjang jalan kabupatendengantingkatkerusakansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah V yang direhabilitasi/dipelihara	500 meter	1.500 meter	1.900 m2	1.900 m2	100	350 m2	350 m2	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VI	nsampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah VI yang direhabilitasi/dipelihara								
1.03.1.03.01.29.07	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah I	Jumlah jembatan dengantingkatkerusakansampaide ngan 30 persenpada UPPU Wilayah I yang direhabilitasi/dipelihara	1 unit	16 unit	1 unit	1 unit	100	-	-	
1.03.1.03.01.29.08	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah II	Jumlah jembatan dengantingkatkerusakansampaide ngan 30 persenpada UPPU Wilayah II yang	1 unit	3 unit	2 unit	2 unit	100	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		direhabilitasi/dipelihara								
1.03.1.03.01.29.09	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah III	Jumlah jembatan dengantingkatkerusakansampaide 30 persenpada UPPU Wilayah III yang direhabilitasi/dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	-	-	
1.03.1.03.01.29.10	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah IV	Jumlah jembatan dengantingkatkerusakansampaide 30 persenpada UPPU Wilayah IV yang direhabilitasi/dipelihara	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	-	-	
1.03.1.03.01.29.11	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola Pada	Jumlah jembatan dengantingkatkerusakansampaide	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah V	30 persenpada UPPU Wilayah V yang direhabilitasi/dipelihara								
1.03.1.03.01.29.12	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VI	Jumlah jembatan dengantingkatkerusakansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah VI yang direhabilitasi/dipelihara	1 unit	1 unit	1jembatan	1 jembatan	100	-	-	
1.03.1.03.01.29.13	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah I	Panjang jaringan irigasi dengantingkatkerusakansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah I yang	25 meter	-	-	-	100	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		direhabilitasi / dipelihara								
1.03.1.03.01.29.14	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah II	Panjang jaringan irigasi dengantingkatkerusakansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah II yang direhabilitasi / dipelihara	25 meter	60 m <sup>1</sup>	80 m <sup>1</sup>	80 m <sup>1</sup>	100	165 Ha	165 Ha	
1.03.1.03.01.29.15	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah III	Panjang jaringan irigasi dengantingkatkerusakansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah III yang direhabilitasi / dipelihara	25 meter	75 m <sup>1</sup>	60 m <sup>1</sup>	60 m <sup>1</sup>	100	471 Ha	471 Ha	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.01.29.16	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah IV	Panjang jaringan irigasi dengantingkatkerusakansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah IV yang direhabilitasi / dipelihara	25 meter	60 m <sup>1</sup>	800 m <sup>1</sup>	800 m <sup>1</sup>	100	-	-	
1.03.1.03.01.29.17	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah V	Panjang jaringan irigasi dengantingkatkerusakansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah V yang direhabilitasi / dipelihara	30 meter	74 m <sup>1</sup>	80 m <sup>1</sup>	80 m <sup>1</sup>	100	-	-	
1.03.1.03.01.29.18	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara Swakelola	Panjang jaringan irigasi dengantingkatker	25 meter	150 m <sup>1</sup>	150 m <sup>1</sup>	150 m <sup>1</sup>	100	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VI	usakansampaide ngan 30 persenpada UPPU Wilayah VI yang direhabilitasi / dipelihara								
1.03.1.03.01.29.19	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah I	Panjang saluransungai dengantingkatker usakansampaide ngan 30 persen pada UPPU Wilayah I yang direhabilitasi/dip elihara	25 meter	-	-	-	100	-	-	
1.03.1.03.01.29.20	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah II	Panjang saluransungai dengantingkatker usakansampaide ngan 30 persen pada UPPU Wilayah II yang	25 meter	40 m <sup>1</sup>	35 m <sup>1</sup>	35 m <sup>1</sup>	100	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		direhabilitasi/dipelihara								
1.03.1.03.01.29.21	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah III	Panjang saluransungai dengantingkatkerusakansampaidengan 30 persen pada UPPU Wilayah III yang direhabilitasi/dipelihara	25 meter	20 m <sup>1</sup>	20 m <sup>3</sup>	20 m <sup>3</sup>	100	-	-	
1.03.1.03.01.29.22	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah IV	Panjang saluransungai dengantingkatkerusakansampaidengan 30 persen pada UPPU Wilayah IV yang direhabilitasi/dipelihara	25 meter	-	-	-	100	-	-	
1.03.1.03.01.29.23	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran	Panjang saluransungai dengantingkatker	25 meter	35 m <sup>1</sup>	35 m <sup>1</sup>	35 m <sup>1</sup>	100	-	-	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah V	usakansampaide ngan 30 persen pada UPPU Wilayah V yang direhabilitasi/dipelihara								
1.03.1.03.01.29.24	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VI	Panjang saluransungai dengantingkatker usakansampaide ngan 30 persen pada UPPU Wilayah VI yang direhabilitasi/dipelihara	25 meter	25 m <sup>1</sup>	25 m <sup>1</sup>	25 m <sup>1</sup>	100	-	-	
1.03.1.03.01.29.25	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah I	Panjang saluran drainase/gorong-gorong dengantingkatker usakansampaide ngan 30 persenpada UPPU Wilayah I	20 meter	180 m <sup>1</sup>	160 m <sup>1</sup>	160 m <sup>1</sup>	100	75 m1	75 m1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		yang direhabilitasi/dipelihara								
1.03.1.03.01.29.26	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah II	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan usakansampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah II yang direhabilitasi/dipelihara	40 meter	60 m <sup>1</sup>	60 m <sup>1</sup>	60 m <sup>1</sup>	100	-	-	
1.03.1.03.01.29.27	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah III	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan usakansampai dengan 30 persen pada UPPU Wilayah III yang	40 meter	80 m <sup>1</sup>	80 m <sup>1</sup>	80 m <sup>1</sup>	100	80 m <sup>1</sup>	80 m <sup>1</sup>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		direhabilitasi/dipelihara								
1.03.1.03.01.29.28	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah IV	Panjang saluran drainase/gorong-gorong dengantingkatkerusakansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah IV yang direhabilitasi/dipelihara	40 meter	120 m <sup>1</sup>	89 m <sup>1</sup>	89 m <sup>1</sup>	100	80 m <sup>1</sup>	80 m <sup>1</sup>	
1.03.1.03.01.29.29	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah V	Panjang saluran drainase/gorong-gorong dengantingkatkerusakansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah V yang	50 meter	69 m <sup>1</sup>	160 m <sup>1</sup>	160 m <sup>1</sup>	100	40 m <sup>1</sup>	40 m <sup>1</sup>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		direhabilitasi/dipelihara								
1.03.1.03.01.29.30	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VI	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang ditingkatkan usakansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah VI yang direhabilitasi/dipelihara	50 meter	45 m <sup>1</sup>	45 m <sup>1</sup>	45 m <sup>1</sup>	100	75 m <sup>1</sup>	75 m <sup>1</sup>	
1.03.1.03.01.29.31	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VII	Panjang jalan kabupatendengantingkatkerusakansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah VII yang direhabilitasi/dipelihara	400 meter	2.650 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>	1300 m <sup>2</sup>	100	350 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.01.29.32	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Secara Swakelola pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VIII	Panjang jalan kabupatendeng tingkatkerusakansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah VIII yang direhabilitasi/dipelihara	450 meter	7000 m <sup>2</sup>	3000 m2	3000 m2	100	850 m2	850 m2	
1.03.1.03.01.29.33	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VII	Jumlahjembatandengantingkatkerusakansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah VII yang direhabilitasi/dipelihara	1 Unit	3 unit	1 unit	1 unit	100	-	-	
1.03.1.03.01.29.34	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan	Jumlahjembatandengantingkatkerusakansampaidengan 30 persenpada	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Umum (UPPU) Wilayah VIII	UPPU Wilayah VIII yang direhabilitasi/dipelihara								
1.03.1.03.01.29.35	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VII	Panjang jaringan irigasi dengantingkatkerusakansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah VII yang direhabilitasi / dipelihara	25 meter	50 meter	70 m <sup>3</sup>	70 m <sup>3</sup>	100	-	-	
1.03.1.03.01.29.36	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Secara Swakelola Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VIII	Panjang jaringan irigasi dengantingkatkerusakansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah VIII yang	30 meter	50 m <sup>1</sup>	50 m <sup>1</sup>	50 m <sup>1</sup>	100	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		direhabilitasi / dipelihara								
1.03.1.03.01.29.37	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VII	Panjang saluransungaiden gantingkatkerusa kansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah VII yang direhabilitasi/dip elihara	25 meter	50 m <sup>1</sup>	50 m <sup>1</sup>	107 m <sup>3</sup>	107 m <sup>3</sup>	-	-	
1.03.1.03.01.29.38	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VIII	Panjang saluransungaiden gantingkatkerusa kansampaidengan 30 persenpada UPPU Wilayah VIII yang direhabilitasi/dip elihara	30 meter	100 m <sup>1</sup>	100 m <sup>1</sup>	50 m <sup>1</sup>	50 m <sup>1</sup>	-	-	
1.03.1.03.01.29.39	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong- Gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong	50 meter	100 m <sup>1</sup>	143 m <sup>3</sup>	143 m <sup>3</sup>	100	60 m <sup>3</sup>	60 m <sup>3</sup>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VII	dengantingkatkerusakansampaide ngan 30 persenpada UPPU Wilayah VII yang direhabilitasi/dipelihara								
1.03.1.03.01.29.40	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-gorong Pada Unit Pengelola Pekerjaan Umum (UPPU) Wilayah VIII	Panjang saluran drainase/gorong-gorongdengantingkatkerusakansampaide ngan 30 persen pada UPPU Wilayah VIII yang direhabilitasi/dipelihara	50 meter	200 m <sup>1</sup>	1100 m <sup>1</sup>	1100 m <sup>1</sup>	100	2000 m <sup>1</sup>	2000 m <sup>1</sup>	
1.03.1.03.01.30	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana kebinamargaan</b>	<b>78%</b>	<b>73%</b>	<b>76%</b>	<b>76%</b>	<b>100%</b>	<b>76%</b>	<b>76%</b>	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dalam kondisi baik								
1.03.1.03.01.30.04	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah alatberat yang disediakan	1 unit	0	-	-	100	-	-	
1.03.1.03.01.30.06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan yang disediakan	1 paket	0	-	-	100	-	-	
1.03.1.03.01.30.11	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat yang terehabilitasi/terpelihara	19 Unit	18 Unit	18alat berat	16 alatberat	100	18alat berat	16 alatberat	
1.03.1.03.01.31	Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi Tingkat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)								
1.03.1.03.01.31.02	Pemberdayaan Pengusaha Jasa Konstruksi (instansi pemerintah, orang perseorangan, badan usaha)	Jumlah rakor jasa konstruksi yang dilaksanakan	Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) 1 aplikasi; Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 laporan	50 penyedia, 1 laporan	8 kegiatan	8 kegiatan	100	-	-	
1.03.1.03.01.32	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Persentase terwujudnya pengawasan jasa konstruksi secara efektif	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program / Kegiatan (Renja PD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2020	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.03.1.03.01.32.01	Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pengawasan Jasa Konstruksi yang disusun	1 laporan	5 laporan	0	0	83,33	0	0	
<b>1.03.1.03.01.34</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Prosentasetersu sunnyadokumen perencanaan tata ruang</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
1.03.1.03.01.34.01	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Jumlahpengolahan peta citramuarasungai	1 Perda	0	1 dokumen	1 dokumen	100	2 dokumen	1 dokumen	
1.03.1.03.01.34.05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang disusun	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	
1.03.1.03.01.34.10	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	Jumlah Rapat Koordinasi Penataan Ruang yang dilaksanakan	15 kali	15 kali	12 Rakor	12 Rakor	100	1 dok	1 dok	

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan sejumlah 11 program dan 22 kegiatan. Dari 11 program yang dilaksanakan semuanya mencapai rata-rata 93,95%.

## **II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam memberikan pelayanan public diukur dengan beberapa indikator kinerja yang sudah ditetapkan. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Perumusan indikator kinerja utama yang digunakan pengukur kinerja DPU TR berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, serta Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58/Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 26 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 – 2021

Indikator Kinerja Utama yang menjadi tolok ukur kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk periode lima tahun sebagaimana tertera pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2018 serta Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021, adalah: Persentase jalan dalam kondisi baik, Persentase jembatan dalam kondisi baik; Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik; Cakupan rumah tangga yang

mendapatkan pelayanan air minum; serta Persentase saluran drainase dalam kondisi baik.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada Tabel II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

**TABEL II.2  
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021**

NO.	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TH 2019 (%)	TH 2020 (%)	TH 2021 (%)	TH 2022 (%) Sesuai Renstra Th. 2021-2026	TH 2020	TH 2021	TH 2021	TH 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase jalan dalam kondisi baik	-	v	91	92	93	66,64 (jalan dlm kondisi mantap)	56,47	57,62	61,96	66,64	
2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	-	v	99	100	100	100	100	97,30	97,30	100	
3	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	-	v	70	73	75	68 (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)	73,04	70,26	93,68	68	
4	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum	v	v	100	100	100	88	86,20	90,66	90,66	88	
5	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	-	v	69	70	71	74	72,16	75,20	105,92	74	
6	Cakupan pemanfaatan tata ruang wilayah	-	v	100	100	100	100	100	100	100	100	

Penjelasan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pemalang Tahun 2021 sebagai berikut :

### **1. Persentase jalan dalam kondisi baik**

Indikator kinerja ***Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik*** dihitung dengan menggunakan rumus: **(Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ÷ Panjang seluruh jalan kabupaten) x 100%**. Berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/746/Tahun 2016 tentang Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Pemalang, jalan kabupaten sepanjang 696,92 Km. Panjang jalan ini bertambah menjadi 765,72 Km dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 188.4/648/Tahun 2018 Tanggal 13 Agustus 2018. Sehingga terdapat penambahan panjang 68,8 Km atau naik 8,99%.

Penambahan panjang jalan ini karena:

- 1) *Downgrade* 6 ruas jalan Jalan Provinsi sepanjang 12,82 Km antara lain Jalan Urip Sumoharjo (1,19 Km), Jalan Jenderal Sudirman (3,56 Km), Jalan Perintis Kemerdekaan (2,26 Km), Jalan Ahmad Yani (1,6 Km), Jalan Gatot Subroto (1,36 Km) dan Jalan DI. Panjaitan sepanjang 2,85 Km;
- 2) *Upgrade* 8 ruas jalan poros desa sepanjang 37,65 Km;
- 3) *Upgrade* 10 ruas Jalan Desa (Jalur Evakuasi) sepanjang 17,61 Km;
- 4) *Upgrade* 2 ruas jalan Jalan Kota sepanjang 0,72 Km.

Dengan adanya penambahan panjang jalan kabupaten ini maka angka pembagi dalam penghitungan indikator *Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik* bertambah.

Pada tahun 2021, realisasi indikator *Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik* sebesar 57,62 persen atau sepanjang 441,20 Km. Apabila dibandingkan dengan targetnya, maka persentase realisasinya adalah 61,95. Realisasi ini masuk dalam kriteria ***Rendah*** dengan interval nilai  $\leq 65$ .

Realisasi yang lebih rendah daripada target tersebut antara lain disebabkan oleh:

- a. Berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/746/Tahun 2016 tentang Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Pemalang, jalan kabupaten sepanjang 696,92 Km.
- b. Panjang jalan ini bertambah menjadi 765,72 Km dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 188.4/648/Tahun 2018 Tanggal 13 Agustus 2018. Sehingga terdapat penambahan panjang 68,8 Km.

- c. Terbatasnya kapasitas anggaran untuk alokasi penanganan jalan dan jembatan yaitu besarnya alokasi untuk infrastruktur jalan melalui Program Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan seluruh Kabupaten Pemalang baru dialokasikan pada angka  $\pm 3\%$  per tahun dengan angka kerusakan tahunan (rate deterioration) 3 s/d 5% pertahun, artinya laju pertumbuhan jalan kabupaten dalam kondisi baik per tahun belum mencapai angka capaian target kinerja RPJMD 2016-2021. DPUTR untuk penanganan kegiatan infrastruktur jalan dari DAU pertahun memerlukan dana 150 s/d 300 Milyar.
- d. Pola penanganan jalan yang belum sesuai yang disebabkan banyaknya program pemeliharaan jalan dengan pengadaan langsung yang tidak signifikan untuk meningkatkan kondisi jalan kabupaten.
- e. Pertumbuhan beban Lalu Lintas Harian (LHR) 3-4 % per tahun

## **2. Persentase jembatan dalam kondisi baik**

Indikator kinerja *Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik* dihitung dengan menggunakan rumus: **(Jembatan dalam kondisi baik ÷ Jumlah jembatan secara keseluruhan) x 100%**.

Sesuai dengan pendataan jembatan tahun 2021 bahwa jembatan yang akan direncanakan untuk SK jembatan berjumlah  $\pm 400$  jembatan. Dari 185 jembatan lama yang digunakan untuk RPJMD 2016-2021 97,3% dalam kondisi baik sejumlah 180 buah. Pada tahun 2021 ada 2 (dua) yang dikerjakan yaitu Pembangunan Jembatan Purana dan Pembangunan Jembatan Cendana.

Terdapat kerusakan beberapa jembatan diantaranya 2 Jembatan Ruas Jalan Semingkir – Majakerta, Jembatan kondisi rusak berat yaitu Jembatan Ruas Jalan Comal – Bodeh, Jembatan Ruas Jalan Bodeh – Jatiroyom, Jembatan Ruas Jalan Majalangu – Gapura.

Kegiatan pembangunan jembatan yang diselesaikan di Tahun 2021 adalah

- a. Pembangunan Jembatan Kali Lumeneng di ruas Jalan Badak – Tambi
- b. Peningkatan Jembatan Kali Polaga di ruas Jalan Cikadu – Gejos

c. Pembangunan Jembatan Purana

d. Peningkatan Jembatan Cendana di ruas Jalan Gapura – wanarata

e. Pembangunan Jembatan Kali Terep di ruas Jalan Kalipaku – Simpur

Dari 185 jembatan lama yang digunakan untuk RPJMD 2016-2021 tercapai 97,30% dalam kondisi baik. Sehingga capaian indicator kinerja sebesar 97,30%.

### **3. Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik**

Indikator *Persentasi Saluran Irigasi Dalam Kondisi Baik* dihitung dengan menggunakan rumus: **(Irigasi dalam kondisi baik ÷ Panjang Irigasi (kewenangan kabupaten) secara keseluruhan) x 100%**. Total panjang saluran irigasi di Kabupaten Pemalang adalah 7.343 Ha (Tujuh ribu tiga ratus empat puluh tiga) hektar, terdiri dari saluran primer sepanjang 5.447,00 (lima ribu empat ratus empat puluh tujuh) meter dan saluran sekunder sepanjang 5.447,00 (lima ribu empat ratus empat puluh tujuh) meter. Di tahun 2021, saluran irigasi dalam kondisi baik mencapai 88.321 meter (delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh satu) meter. Sehingga apabila dibandingkan dengan panjang seluruh saluran irigasi, maka realisasi di tahun 2021 sebesar 70,26 persen.

Apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya mengalami penurunan di tahun 2021. Dimana saluran irigasi dalam kondisi baik sebesar 70,05 persen di tahun 2019. Meningkat menjadi 73,04 persen di tahun 2020 tetapi menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 70,26 persen. Dikarenakan adanya refocusing anggaran.

### **4. Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air minum**

Indikator *Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan (akses air minum)* dihitung dengan menggunakan rumus **(Jumlah masyarakat yang terlayani ÷ Proyeksi total masyarakat) x 100%**. Akses air minum meliputi air minum yang berasal dari sumur dalam, sumur dangkal, Penampungan Air Hujan (PAH) dan jaringan Pamsimas.



Jumlah penduduk yang terlayani air minum pada tahun 2021 sebesar 1.334.089 jiwa atau 266.818 Ruta. Sementara proyeksi jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang Tahun 2020 sebesar 1.471.489 jiwa. Sehingga realisasi cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan (akses air minum) adalah sebesar 90,66 persen.

Realisasi di tahun 2021 tersebut lebih tinggi daripada realisasi tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 realisasinya sebesar 96,21 persen dan tahun 2020 sebesar 86,20 persen. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan jumlah penduduk yang berkurang dari 1.483.600 jiwa menjadi 1.471.489 jiwa sehingga indikator penyebut sebagai pembagi menurun yang berakibat hasil prosentase meningkat.

#### **5. Persentase saluran drainase dalam kondisi baik**

Indikator kinerja *Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik* dihitung dengan menggunakan rumus: **(Panjang drainase dalam kondisi baik ÷ Panjang seluruh drainase di wilayah perkotaan) x 100%**. Di tahun 2021 realisasi drainase dalam kondisi baik sebesar 75,20 persen. Realisasi ini diperoleh pembagian dari panjang drainase dalam kondisi baik sebesar 333.287 meter dan panjang drainase keseluruhan sebesar 443.173 meter.

Apabila dibandingkan dengan realisasi dua tahun sebelumnya, maka realisasi tahun 2021 menunjukkan peningkatan positif. Drainase dalam kondisi baik di tahun 2019 mencapai 71,07 persen. Sedangkan realisasi di tahun 2020 sebesar 72,16 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu sebesar 71 persen, maka realisasi di tahun yang sama melampaui target sebesar 105,91 persen. Artinya bahwa realisasi kinerja *Sangat Tinggi* dengan nilai di atas 100.

#### **6. Cakupan pemanfaatan tata ruang wilayah**

Meningkatnya kebutuhan ruang di Kabupaten Pemalang sejalan dengan adanya peningkatan ekonomi penduduk dan aktivitas penduduk, disisi lain keberadaan lahan tetap dan terbatas. Sebagai bentuk upaya penataan pada ruang agar dapat mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang seimbang

antara kepentingan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk kegiatan investasi.

Kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang harus mengacu pada rencana tata ruang. Kegiatan yang sesuai dengan penataan ruang diharapkan berdampak positif baik terhadap ekonomi maupun lingkungan. Penataan ruang terdiri dari perencanaan tata ruang, program pemanfaatan ruang, dan program pengendalian pemanfaatan ruang. Formula yang digunakan untuk menghitung persentase ketaatan terhadap RTRW adalah sebagai berikut :

<b>Realisasi RTRW</b>	<b>x 100 %</b>
<b>Rencana Peruntukan</b>	

Dalam proses pemberian izin usaha di Kabupaten Pemalang salah satu pertimbangan yang harus dipenuhi adalah kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang yang ada sehingga tingkat ketaatan terhadap RTR di Kabupaten Pemalang sudah 100% karena jika tidak sesuai dengan peruntukan dalam Tata Ruang tidak akan mendapatkan izin yang dibutuhkan. Hal yang masih menjadi tantangan Pemerintah kabupaten adalah upaya lebih menyadarkan lagi pada masyarakat bahwa hak kepemilikan lahan memang diakui Pemerintah, namun penggunaannya yang diatur untuk keserasian fungsi kawasan lindung dan budidaya. Selama ini, ada anggapan dari sebagian masyarakat bahwa lahan milik mereka akan bebas untuk digunakan apa saja, tidak peduli arahan fungsi ruangnya sebagai kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Sebagai acuan dalam pemberian Informasi Tata Ruang sebelum tahun 2018 menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 - 2031, sedangkan pada tahun 2018 hingga sekarang menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038.

## Hasil Evaluasi SAKIP

Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah (Wakhyudi, 2007). Sistem ini dibutuhkan dalam rangka mendorong terciptanya anggaran berbasis kinerja yang diyakini sebagai paradigma pengelolaan keuangan paling efektif untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang berkinerja tinggi. SAKIP mencoba mengintegrasikan berbagai sistem dalam manajemen pemerintahan dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem pengukuran, sistem pelaporan, sampai dengan sistem evaluasi.

Pada tahun 2020 DPUTR memperoleh nilai CC ( 59,16 ) dari hasil evaluasi SAKIP DPUTR masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Sistem AKIP, diantaranya terkait Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

**Tabel II.3**

### **Perbandingan hasil SAKIP Tahun 2019 dan 2020**

No.	Uraian Hasil Evaluasi	Nilai Tahun 2019	Nilai Tahun 2020
1	<b><u>Perencanaan Kinerja</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kualitas indikator tujuan maupun sasaran agar memenuhi kriteria SMART dan Penetapan Target Kinerja agar didasarkan pada penghitungan dan basis data yang memadai</li></ul>	18,26	19,15
2	<b><u>Pengukuran Kinerja</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan kualitas pengukuran kinerja dan tindak lanjut atas permasalahan yang menghambat capaian kinerja</li></ul>	11,25	11,25
3	<b><u>Pelaporan Kinerja</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaikan kualitas penyajian informasi dalam LKJiP</li></ul>	10,97	10,97

No.	Uraian Hasil Evaluasi	Nilai Tahun 2019	Nilai Tahun 2020
4	<b><u>Evaluasi Internal</u></b> • Evaluasi Internal belum dilakukan secara berkala dan belum terdokumentasi secara tertib	4,91	4,91
5	<b><u>Capaian Kinerja</u></b> • Sebagian besar capaian target berasal dari indikator yang bersifat <i>Output</i> bukan <i>Outcome</i>	14,38	12,88
	<b><u>Jumlah</u></b>	<b>59,77</b>	<b>59,16</b>

### II.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.

Identifikasi permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, dipengaruhi oleh faktor internal (kewenangan PD) dan faktor eksternal (di luar kewenangan PD). Adapun permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut:

#### ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

##### a. *Kekuatan (Strengths)*

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan DPUTR Kabupaten Pemalang dalam mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati. Faktor-faktor kekuatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Adanya Kebijakan
- 2) Jumlah sarana dan prasarana yang memadai
- 3) Adanya dukungan program
- 4) Adanya Tupoksi yang jelas
- 5) Tersedianya SDM yang berpengalaman
- 6) Adanya sistem pelaporan yang sudah baku dan berjalan sesuai kesepakatan secara nasional,

##### b. *Kelemahan (Weakness)*

Selain memiliki beberapa kekuatan seperti telah dijelaskan di atas, DPUTR Kabupaten Pemalang masih memiliki beberapa kelemahan internal yang

menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan, beberapa kelemahan tersebut adalah seperti dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Jumlah dan tingkat pendidikan pegawai yang tidak merata di tiap-tiap bagian
- 2) Motivasi kerja pegawai kurang/lemah
- 3) Pengetahuan dan keterampilan pegawai yang tidak merata
- 4) System surveilans data dan kasus belum berjalan optimal
- 5) Lemahnya manajemen SDM, distribusi SDM professional kurang merata, pembinaan SDM yang tidak optimal
- 6) Kurang kesempatan SDM untuk peningkatan profesionalisme dibidang ke PU-an
- 7) Seringnya ada pergantian Stakeholder, sehingga kesinambungan pelaksanaan program tidak terjamin
- 8) Tenaga Teknisi yang ada di daerah masih kurang dari jumlah pelayanan ke masyarakat yang ada
- 9) Masih kurangnya data base dan pengembangan teknologi informasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketenagalistrikan.
- 10) Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kegiatan Ke-PU-an.

## **ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL**

### ***a. Peluang (Opportunities)***

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran DPUTR Kabupaten Pemalang dalam mencapai Visi dan Misinya diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam suatu pelaksanaan tugas
- 2) Dukungan anggaran yang memadai
- 3) Kesempatan mengembangkan keahlian dan keterampilan yang cukup
- 4) Meningkatnya kesejahteraan pegawai
- 5) Kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang saling menguntungkan
- 6) Perkembangan ilmu dan teknologi dalam peningkatan SDM ke-PU an
- 7) Adanya program-program unggulan

- 8) Meningkatnya peran profesi di pelayanan infrastruktur
- 9) Meningkatnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan umum yang bermutu di mana pelayanan umum merupakan bagian dari pelayanan DPUTR
- 10) Kesempatan pengembangan SDM
- 11) Kerjasama lintas program/lintas sektor sudah mulai berjalan
- 12) Dukungan Bupati menjadikan program infrastruktur merupakan program skala prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Pemalang
- 14) Digalakkan praktik good governance yang memacu kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta

**b. Ancaman (Threats)**

Selain peluang-peluang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat pula ancaman/tantangan/kendala terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi DPUTR Kabupaten Pemalang dalam pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Ancaman ini terutama datang dari luar DPUTR Kabupaten Pemalang yang akan berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pelatihan peningkatan keterampilan dalam perencanaan program
- 2) Rendahnya pengawasan tingkat disiplin pegawai
- 3) Kurang tersosialisasinya pelaksanaan UU atau kebijakan Infrastruktur.

Dari berbagai adanya faktor-faktor keterbatasan baik yang bersifat internal maupun eksternal maupun peluang/kesempatan yang ada, maka dapat diidentifikasi yang menjadi isu-isu penting yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang sebagai satu-satunya Unit Organisasi yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

**Tabel II.4**  
**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**  
**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Kapasitas jaringan jalan belum optimal sebagai prasarana angkutan penumpang dan barang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas jalan yang belum memenuhi standar teknis</li>   <li>- Kapasitas jembatan yang belum memenuhi standar teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya bangunan pelengkap jalan (saluran/drainase jalan, bangunan dinding penahan tanah)</li> <li>- Penanganan teknis pembangunan dan perbaikan jalan belum sesuai standar teknis</li> <li>- Kurangnya pengawasan tonase beban angkutan/kendaraan</li> <li>- Kurangnya kesadaran masyarakat didalam memelihara jalan dan drainase yang ada</li> <li>- Struktur jembatan yang belum memenuhi standar Dirjen Bina Marga</li> <li>- Penumpukan sampah di sekitar abutment jembatan membuat udara sekitar bersifat asam sehingga menyebabkan korosi pada rangka baja jembatan</li> <li>-</li> </ul>
	Masih rendahnya kinerja pengelolaan SDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinerja prasarana jaringan irigasi belum optimal (rata-rata nilai IKSI <math>\geq 60</math>) IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi fisik prasarana jaringan irigasi masih ada yang rusak</li> <li>- Sarana penunjang kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi masih kurang memadai</li> <li>- Kapasitas SDM pengelolaan jaringan irigasi terbatas</li> </ul>

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan mata air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi pengguna air irigasi masih rendah</li> <li>- Kerusakan berat pada jaringan tersier</li> <li>- Kurangnya koordinasi antar instansi dan antar P3A</li> <li>- Belum tersedianya alat pemantau hujan, banjir dan pasang surut</li> <li>- Belum optimalnya Aplikasi Pantau Debit Banjir (SIPANDA)</li> <li>- Belum terbaharuinya data mata air</li> </ul>
3.	Belum optimalnya cakupan air minum yang layak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan kualitas dan kuantitas ketersediaan air baku untuk air minum di wilayah tertentu</li> <li>- Keterbatasan sarana dan prasarana air minum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum dimanfaatkannya sumber air alternatif di wilayah tertentu</li> <li>- Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas air yang bersumber dari air hujan</li> <li>- Belum optimalnya sistem penyediaan air minum (SPAM)</li> <li>- Kesadaran masyarakat untuk berkontribusi terhadap pengelolaan SPAM masih rendah (iuran bulanan dan sinergitas antara desa dan pengelola)</li> <li>- Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan air minum layak bagi rumah tangga miskin</li> </ul>
4.	Masih rendahnya cakupan air limbah	Masih rendahnya akses IPAL domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbah domestik</li> <li>- Terbatasnya bangunan IPAL komunal (ketersediaan lahan)</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum berfungsinya IPLT secara maksimal sehingga lumpur tinja belum diolah sebagaimana mestinya</li> </ul>



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
5.	Masih rendahnya sarana dan prasarana persampahan yang sesuai standar	Masih kurangnya akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan	- Masih kurangnya jumlah TPS/TPST/TPS3R/TPA - Masih kurangnya jumlah kendaraan angkut
6.	Masih banyak bangunan Gedung yang belum tertib dan andal	Penyelenggaraan Bangunan Gedung belum mengacu pada optimalisasi Bangunan Gedung Hijau, Bangunan Mitigasi Bencana serta Bangunan Negara dan bangunan Cagar budaya, Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	- Kurangnya sosialisasi sistem informasi dan regulasi tata bangunan dan gedung - Kurangnya kualitas SDM penyelenggara bangunan Gedung - Kurangnya pendataan bangunan Gedung negara
7.	Masih rendahnya intensitas kegiatan pemanfaatan ruang	Belum optimalnya sistem pengendalian pemanfaatan ruang	- Belum tersedianya RDTRK - Pelaksanaan pembinaan penataan ruang yang masih belum efektif

Dengan teridentifikasinya isu-isu penting tersebut dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi, arah dan kebijakan serta program kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang dalam rangka mengatasi isu-isu strategis guna mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi PD, melalui program-program sebagai berikut :

**Tabel II.5**

**Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pemalang Tahun 2022**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja
	(2)	(3)	(5)
	<b><u>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u></b>		
		Indeks Reformasi Birokrasi	64,97
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja DPUTR	64,97
A.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	43,65
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	60,25

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja
<b>I.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang di susun	2 Jenis
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	-
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan bulanan perkembangan kegiatan DPU TR yang disusun	-
<b>II.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	158 ob
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	-
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	-
4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran semester 1 dan 2 serta laporan inventarisasi BMD yang disusun	-
<b>III.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi</b>	<b>43,65 Indeks 60,25 nilai</b>
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	30 orang
<b>IV.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi</b>	<b>43,65 Indeks 60,25 nilai</b>
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara instalasi listrik/penerangannya	9 unit
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	6 jenis
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	-
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis makanan dan minuman yang dibeli	2 jenis
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	7 jenis
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang dibeli	2 jenis
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	153 kali

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja
<b>V.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan</b>	<b>100%</b>
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	-
2.	Pengadaan Mebel	Jenis mebeleur yang dibeli	-
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	1 jenis
<b>VI.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>	<b>100%</b>
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	5 jenis
2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli	28 jenis
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa pelayanan umum yang dibutuhkan	4 jenis
<b>VII.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>100%</b>
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diservis dan berizin	122 unit
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat yang terehabilitasi	18 unit
3.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat yang terehabilitasi	-
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	2 jenis
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit
6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	-
<b>B.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik</b>	<b>68%</b>
<b>I.</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Capaian Pengaman Pantai dan Jaringan Sungai Yang dikelola</b>	<b>30%</b>
1.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen kajian kawasan terdampak genangan pasang/rob yang disusun	-

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja
2.	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dan aplikasi yang disusun	3 dok
3.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung yang Dibangun	-
4.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang terbing yang dibangun	700 m
5.	Pembangunan Check Dam	Panjang bangunan chekdam yang dibangun	-
6.	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang bangunan pantai yang dibangun	-
7.	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah pemasangan instalasi pantau debit sungai yang dibangun	-
8.	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi	-
9.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi	-
10.	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi	-
11.	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang ditingkatkan	-
12.	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang ditingkatkan	-
13.	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah bangunan pengaman pantai yang ditingkatkan	-
14.	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi	11000 m
15.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat yang diselenggarakan	-
16.	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang sungai yang dipelihara	-
<b>II.</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Capaian Jaringan Irigasi Yang Dikelola</b>	<b>70%</b>
1.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan Indeks Kinerja Sistem Irigasi	3 dok
2.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	-
3.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah DI yang direhabilitasi	20 DI
4.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi yang dipelihara	91 DI

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja
5.	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi	-
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan pedesaan</b>	<b>88%</b>
<b>I.</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan (akses air minum)</b>	<b>50011 SR</b>
1.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah bangunan/Sambungan Rumah yang dibangun	4008 SR/unit
		Panjang jaringan pipa sumber air yang dibangun	51005 m
2.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah bangunan/Sambungan Rumah yang ditingkatkan	993 SR/unit
		Panjang jaringan air bersih yang ditingkatkan	9027 m
<b>D.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase sarana prasarana persampahan sesuai standar</b>	<b>20,62%</b>
<b>I.</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sarpras persampahan sesuai standar yang dibangun dan direhabilitasi</b>	<b>7 Unit</b>
1.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	1 unit
2.	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS3R yang direhabilitasi	6 unit
<b>E.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik</b>	<b>93%</b>
<b>I.</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</b>	<b>12 Unit</b>
1.	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang ditingkatkan	-
2.	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun	9 unit
		Jumlah pengelolaan sampah yang dibangun	1 unit
<b>D.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik</b>	<b>74%</b>
<b>I.</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan direhabilitasi</b>	<b>11555 m</b>

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja
1.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	-
2.	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang direhabilitasi/dipelihara	8333 m
3.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang dipelihara	3872 m3
<b>E.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik Sesuai Tertib Administrasi Tata Bangunan</b>	<b>50%</b>
<b>I.</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Jumlah gedung perkantoran yang dibangun (lanjutan)</b>	<b>30 rekom 3 unit</b>
		<b>Jumlah gedung perkantoran yang dibangun (lanjutan)</b>	
		<b>Jumlah dokumen rekomendasi penyelenggaraan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</b>	
1.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah dokumen pendataan Bangunan Gedung Negara	1 dok
2.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan bangunan gedung pemerintah yang disusun	5 dok
		Jumlah dokumen perencanaan bangunan gedung pemerintah yang disusun	2 dok
		Jumlah gedung perkantoran yang dibangun (lanjutan)	4 unit
		Jumlah gedung perkantoran yang direhabilitasi	1 unit
3.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan perkembangan progres pembangunan yang diselenggarakan	-
4.	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuaui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan yang disusun	3 dok
		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dok
		Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	3 unit

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja
F.	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya dengan peraturan dan perencanaan tata bangunan</b>	<b>20%</b>
I.	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kawasan yang dibangun/ditata</b>	<b>1 kawasan</b>
1.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungannya yang dibangun dalam kawasan yang terencana	1 unit
G.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap</b>	<b>65%</b>
I.	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Kondisi Jalan dalam Kondisi Mantap</b>	<b>66,64%</b>
		<b>Prosentase Kondisi Jembatan dalam Kondisi Mantap</b>	<b>100%</b>
1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan penyelenggaraan jalan dan jembatan yang disusun	-
2.	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	-
3.	Pengelolaan Leger Jalan	Panjang Leger Jalan yang dibuat	-
4.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Survey	2 dok
5.	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang di bangun	-
6.	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang dilebarkan	4000 m3
7.	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang ditambah lajur	-
8.	Rekonstruksi Jalan	Panjang Rekonstruksi Jalan Kabupaten	60000 m2
9.	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang di Rehabilitasi	-
10.	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang di Pelihara Secara Berkala	-
11.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	8000 m
		Panjang jalan yang dipelihara secara rutin (swakelola + 8 upji)	169,49 k m
12.	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	3 unit
13.	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	-
14.	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan Kabupaten yang dilebarkan	-
15.	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang di Rehabilitasi	-
16.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang di Pelihara	-
17.	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang di Pelihara Secara Berkala	-
18.	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah Jalan/Jembatan yang di Tangani	-
19.	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Jalan/Jembatan	-
20.	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Pengawasan Teknis Jalan/Jembatan	-

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja
H.	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi</b>	<b>10%</b>
I.	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Tenaga Terampil konstruksi yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat</b>	<b>1 dok 10 keg 45 org</b>
1.	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil yang mengikuti pelatihan	-
2.	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil konstruksi yang Bersertifikat	-
3.	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi yang disusun	1 dok
II.	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah jenis informasi tingkat kabupaten pada sistem informasi jasa konstruksi (SIPJAKI)</b>	-
1.	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi yang disusun	-
III.	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>	<b>Jumlah pemantauan dan evaluasi penerbitan IUJK yang diterbitkan</b>	-
		<b>Jumlah Naskah Akademik/Peraturan terkait Penyelenggaraan IUJK yang tersusun</b>	-
1.	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan Naskah Akademik Perbup Pelaksanaan IUJK yang disusun	-
2.	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah pemantauan dan evaluasi penerbitan IUJK yang diterbitkan	-
IV.	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>Jumlah pelatihan tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	-
		<b>Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha Jasa Konstruksi</b>	-
		<b>Jumlah alat pengetesan konstruksi yang disediakan</b>	-
1.	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta pelatihan terkait tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-
		PNS/ staf yang terlatih tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
2.	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengadaan alat pengetesan konstruksi	-



No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian Kinerja
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentase pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah</b>	<b>100%</b>
<b>I.</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peraturan rencana detail tata ruang yang diterbitkan</b>	<b>100%</b>
1.	Pelaksanaan Persetujuan Subtansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen persetujuan substansi RDTR Kawasan Perkotaan yang disusun	
2.	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	1 dok
3.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan penataan ruang	
<b>II.</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan tata ruang yang disusun</b>	<b>100%</b>
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen materi teknis evaluasi RTRW Kab. Pemalang yang disusun	-
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen materi teknis RDTRK Kawasan Perkotaan Comal yang disusun	1 dok
<b>III.</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Dokumen ITR yang diterbitkan</b>	<b>100%</b>
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	tersedianya layanan ITR bagi masyarakat	-
		Terselenggaranya koordinasi penataan ruang daerah	-
		Terselenggaranya Konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Dunia Usaha terkait penataan ruang daerah	-
2.	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedia sarana Informasi dan pelayanan bidang penataan ruang	-
<b>IV.</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase tersusunnya dokumen pedoman teknis pengendalian pemanfaatan ruang</b>	<b>100%</b>
1.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya kajian evaluasi pemanfaatan lahan di Kabupaten Pemalang	1 dok

Sementara itu dalam rangka pelaksanaan pelayanan dasar sesuai UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian program Ekonomi Berkeadilan, serta mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi kewenangan daerah, maka tantangan yang dihadapi adalah :

### **1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 18 mengamanatkan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah harus memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. Sosial

Selanjutnya ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal disebut sebagai Standar Pelayanan Minimal atau SPM. Untuk menindaklanjuti penerapan SPM tersebut, maka telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal jenis pelayanan dasar beserta indikator kinerja bidang Pekerjaan Umum yang harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 adalah :

No	Jenis Pelayanan Kebutuhan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

Penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan data, yaitu pengumpulan dan pendataan secara berkala;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, yaitu melakukan penghitungan kebutuhan ketersediaan dan keterjangkauan barang untuk pemenuhan pelayanan dasar.
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, yaitu menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan ketersediaan dan keterjangkauan yang dituangkan kedalam dokumen RPJMD dan RKPD;
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, yaitu melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar melalui program dan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang telah dituangkan dalam komet perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

## **2. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG's) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals) (MGDs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan

lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Penandatanganan Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan oleh Presiden Jokowi pada bulan Juli 2017 merupakan tonggak utama yang menetapkan struktur dan mekanisme tata kelola SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB) nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan dan pelaporan. Percepatan diperlukan di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengintegrasikan TPB kendala rencana pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) sebagaimana dimandatkan oleh Perpres. RAD TPB merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan social masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan TPB antara lain:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dari ketujuh belas tujuan TPB tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertanggung jawab dalam pencapaian 1 (satu) tujuan yaitu Tujuan 6.

**TUJUAN 6 MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA**

INDIKATOR SDGs KAB/KOTA	BASELINE (2020) (%)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET 2021
Persentase Rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman	86,20	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum	87%
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Sistem Pengelolaan Air Minum	4008 SR
		Sub Kegiatan : Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah bangunan/ Sambungan Rumah yang dibangun	4008 SR/Unit
			Panjang jaringan pipa sumber air yang dibangun	51005 m
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	jumlah bangunan/ Sambungan Rumah yang ditingkatkan	993 SR/Unit
			Panjang jaringan air bersih yang ditingkatkan	9027 m
Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman termasuk fasilitas ctps	92,69	Program : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	91,70
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	14 Unit
		Sub Kegiatan : Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang ditingkatkan	18 Unit
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun

<b>INDIKATOR SDGs KAB/KOTA</b>	<b>BASELINE (2020) (%)</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET 2021</b>
Jumlah Kab/Kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)	0	-	-	-
Jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan yang tersedia sesuai amanat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten	0	-	-	-
Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal		-	-	-

### **3. Pencapaian prioritas pembangunan nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh pemangku kepentingan.

Ada 7 (tujuh) Prioritas nasional pada tahun 2021 adalah penguatan ketahanan ekonomi; pengembangan wilayah; peningkatan SDM; peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; penguatan infrastruktur; pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan stabilitas politik hukum dan transformasi pada publik.

Dalam pencapaian prioritas nasional tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupaya mendukung prioritas nasional yang ke-5 yaitu penguatan infrastruktur.

Peluang yang ada dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah:

1. Adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam peningkatan konektivitas antar wilayah serta pemerataan pembangunan melalui peningkatan infrastruktur kabupaten;
2. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan;
3. Perkembangan teknologi;
4. Dukungan peraturan, perundang-undangan terkait pelaksanaan pembangunan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
5. Kebutuhan infrastruktur kabupaten.

#### **II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari Renstra DPUTR dan RPJMD pada tahun perencanaan, hal ini dilakukan agar target dan indikator capaian serta kebutuhan pendanaan dapat terealisasi sesuai yang telah



ditetapkan, disamping itu juga harus mempertimbangkan beberapa usulan yang berkembang dari masyarakat dan hal-hal mendesak yang muncul dalam proses perencanaan.

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tidak berbeda.
2. Rumusan program dan kegiatan yang terdapat dirancangan awal RKPD atau program dan kegiatan sebesar Rp. 221.296.512.000,-- sedangkan Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 107.377.043.000,--. Perbandingannya dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel II.6**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2022**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pemalang**

No	Rancangan awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>DPUTR</b>			<b>221.296.512.000</b>					<b>107.377.043.000</b>	
<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>32.559.695.000</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Persentase terwujudnya penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>100%</b>	<b>21.643.316.000</b>	
<b>I.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian dan laporan capaian kinerja yang mendukung kelancaran ugas dan fungsi perangkat daerah</b>	<b>100%</b>	<b>139.326.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu</b>		<b>2.000.000</b>	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan teknis disusun	4 Jenis	82.126.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPUTR	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang di susun	2 Jenis	2.000.000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	4 laporan	12.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPUTR	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	-	-	

No	Rancangan awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	12 laporan	45.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPUTR	Jumlah laporan bulanan perkembangan kegiatan DPUTR yang disusun	-	-	
<b>II.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>17.979.569.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu</b>		<b>18.393.316.000</b>	
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12 bulan	17.904.695.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	DPUTR	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	12 bulan	18.393.316.000	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang melaksanakan Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	19 orang	67.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPUTR	Jumlah Non ASN yang melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	-	-	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1 laporan	5.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	DPUTR	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	-	-	
4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 laporan	2.074.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	DPUTR	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran semester 1 dan 2 serta laporan inventarisasi BMD yang disusun	-	-	
<b>III.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi</b>	<b>100%</b>	<b>85.550.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi</b>		<b>32.000.000</b>	
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	30 orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPUTR	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti pelatihan pelaksanaan tupoksi SKPD		32.000.000	

No	Rancangan awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>IV.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>572.467.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi</b>		<b>283.525.000</b>	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara instalasi listrik/penerangannya	9 unit gedung	36.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPUTR	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara instalasi listrik / penerangannya		5.000.000	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	4 jenis	85.707.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPUTR	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli		68.050.000	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	3 jenis	12.160.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPUTR	Jenis peralatan rumah tangga yang dibeli		-	
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	2 jenis	115.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPUTR	Jenis makanan dan minuman yang dibeli		60.000.000	
5.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	7 jenis	100.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPUTR	Jumlah dan Jenis barang yang dicetak dan di gandakan		30.000.000	
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli	2 jenis	23.100.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	DPUTR	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang dibeli		10.500.000	
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang diikuti	153 kali	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPUTR	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti		109.975.000	

No	Rancangan awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>V.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan</b>	<b>100%</b>	<b>10.655.005.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan</b>		<b>4.526.000</b>	
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dibeli	1 unit	650.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPUTR	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli		-	
2.	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli	4 jenis	10.000.000.000	Pengadaan Mebel	DPUTR	Jenis mebeleur yang dibeli		-	
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dibeli	1 jenis	5.005.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPUTR	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli		4.526.000	
<b>VI.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>	<b>100%</b>	<b>2.306.278.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>		<b>2.529.154.000</b>	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	5 jenis	258.340.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPUTR	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan		264.000.000	
2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibeli	32 jenis	100.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPUTR	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli		70.000.000	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah dan jenis jasa pelayanan umum yang dibutuhkan	4 jenis	1.947.938.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPUTR	Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor yang tersedia		2.195.154.000	

No	Rancangan awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>VII.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>821.500.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang dipelihara</b>		<b>398.795.000</b>	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diservis dan berizin	122 unit	200.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPUTR	Jumlah kendaraan yang diservis dan berizin		117.000.000	
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara	18 unit	180.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DPUTR	Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat yang terehabilitasi		179.845.000	
3.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang dipelihara	75 unit	6.000.000	Pemeliharaan Mebel	DPUTR	jumlah mebeleur kantor yang di pelihara		-	
4.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	2 jenis	49.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPUTR	jenis peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		44.400.000	
5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	236.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPUTR	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi		57.550.000	
6.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	150.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPUTR	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi			

No	Rancangan awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
B.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Presentase Jaringan Sumber Daya Air Dalam Kondisi Baik</b>	<b>60 %</b>	<b>17.182.343.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik</b>		<b>3.702.039.000</b>	
I.	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Capaian Pengaman Pantai dan Jaringan Sungai Yang dikelola</b>	<b>100%</b>	<b>10.104.611.926</b>	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Capaian Pengaman Pantai dan Jaringan Sungai Yang dikelola</b>		<b>831.705.000</b>	
1.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen perencanaan teknis yang tersusun	4 dokumen	110.077.500	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	DPUTR	Jumlah dokumen kajian kawasan terdampak genangan pasang/rob yang disusun		-	
2.	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan teknis yang tersusun	3 dokumen	244.777.500	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	DPUTR	Jumlah dokumen dan aplikasi yang disusun		31.705.000	
3.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung yang Dibangun	1 unit	215.271.000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	DPUTR	Jumlah Embung yang Dibangun		-	
4.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang tebing yang terbangun	700 m	798.711.000	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	DPUTR	Panjang terbing yang dibangun		200.000.000	

No	Rancangan awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5.	Pembangunan Check Dam	Pembangunan chek dam yang terehabilitasi	30 m	198.711.000	Pembangunan Check Dam	DPUTR	Panjang bangunan chekdam yang dibangun			-
6.	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang pengaman pantai yang terbangun	50 m	203.381.000	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	DPUTR	Panjang bangunan pantai yang dibangun			-
7.	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Pemasangan Instalasi pantau Debit Sungai	4 unit	118.711.000	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	DPUTR	Jumlah pemasangan instalasi pantau debit sungai yang dibangun			-
8.	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung Terehabilitasi	3 bh	226.811.000	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	DPUTR	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi			-
9.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai Terehabilitasi	100 m	515.511.000	Rehabilitasi Tanggul Sungai	DPUTR	Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi			-
10.	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Perkuatan Tebing Terehabilitasi	3.000 m	1.793.311.000	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	DPUTR	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi			-
11.	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sunga yang ditingkatkan	50 m	217.311.000	Peningkatan Tanggul Sungai	DPUTR	Panjang tanggul sungai yang ditingkatkan			-
12.	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	100 m	404.658.684	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	DPUTR	Panjang bangunan perkuatan tebing yang ditingkatkan			-
13.	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah bangunan pengaman pantai yang ditingkatkan	200 bh	217.311.000	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	DPUTR	Jumlah bangunan pengaman pantai yang ditingkatkan			-
14.	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang ternormalisasi	11.000 m	4.262.381.000	Normalisasi/Restorasi Sungai	DPUTR	Panjang sungai yang dinormalisasi		600.000.000	



No	Rancangan awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat	5 keg	163.711.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	DPUTR	Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat yang diselenggarakan			-
16.	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang sungai terpelihara	28.000 m	413.966.242	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	DPUTR	Panjang sungai yang dipelihara			
<b>II.</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Capaian Jaringan Irigasi Yang Dikelola</b>	<b>100%</b>	<b>7.077.731.074</b>	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Capaian Jaringan Irigasi Yang Dikelola</b>			<b>2.870.334.000</b>
1.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis yang tersusun	3 Dokumen	310.477.500	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	DPUTR	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan Indeks Kinerja Sistem Irigasi			218.295.000
2.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	100 ha	318.611.000	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	DPUTR	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan			-
3.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	9 bh 2000 meter	5.264.361.074	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	DPUTR	Jumlah DI yang direhabilitasi			2.452.039.000

No	Rancangan awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	bangunan yang direhabilitasi									
4.	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan yang dipelihara	91 DI	994.676.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	DPUTR	Luas jaringan irigasi yang dipelihara		200.000.000	
5.	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah pengawasan dan alokasi air	1 Kegiatan	189.605.500	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	DPUTR	Jumlah pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi		-	
<b>C.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Presentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Bersih</b>	<b>97%</b>	<b>33.017.981.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan pedesaan</b>		<b>3.299.794.000</b>	
<b>I.</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Sistem Pengolahan Air Minum</b>	<b>87%</b>	<b>33.017.981.000</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan (akses air minum)</b>		<b>3.299.794.000</b>	
1.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Bangunan/Sambungan Rumah yang dibangun	4.008 SR/UNIT	28.052.981.000	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	DPUTR	jumlah bangunan/Sambungan Rumah yang dibangun		660.000.000	
		Panjang Jaringan Pipa Sumber Air yang dibangun	51.005 Meter				Panjang jaringan pipa sumber air yang dibangun			
2.	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Bangunan/Sambungan Rumah yang dibangun	993 SR/UNIT	4.965.000.000	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	DPUTR	jumlah bangunan/Sambungan Rumah yang ditingkatkan		2.639.794.000	

No	Rancangan awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Panjang Jaringan Air Bersih yang ditingkatkan	9.027 METER				Panjang jaringan air bersih yang ditingkatkan		-	
<b>D.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase Terbangunnya Sarana Prasarana Persampahan sesuai Standar</b>		<b>100.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Persentase sarana prasarana persampahan sesuai standar</b>		<b>200.000.000</b>	
<b>I.</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Sarpas Persampahan Sesuai Standar</b>	<b>100%</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DPUTR</b>	<b>jumlah sarpras persampahan sesuai standar yang dibangun dan direhabilitasi</b>		<b>200.000.000</b>	
1.	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/TPS/SPA /TPS3 R/ yang dibangun	1 unit	50.000.000	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3 R/TPS	DPUTR	Jumlah TPA/TPST/TPS/SPA /TPS3R yang dibangun		100.000.000	
2.	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/TPS/SPA /TPS3 R/ yang direhabilitasi	1 unit	50.000.000	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS3 R/TPS	DPUTR	Jumlah TPA/TPST/TPS/SPA /TPS3R yang direhabilitasi		100.000.000	
<b>E.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Pengelolaan Limbah Domestik</b>	<b>91 %</b>	<b>7.426.892.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik</b>		<b>5.374.694.000</b>	
<b>I.</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam</b>	<b>Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik</b>	<b>92 %</b>	<b>7.426.892.000</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</b>		<b>5.374.694.000</b>	

No	Rancangan awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1.	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah pengolahan air limbah terpusat skala permukiman yang ditingkatkan	9 Unit	7.026.892.000	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	DPUTR	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang ditingkatkan		-	
2.	Pembangunan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah pengolahan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun	3 Unit	400.000.000	Pembangunan/Perbaikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	DPUTR	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun		5.374.694.000	
<b>F.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik</b>	<b>71 %</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik</b>		<b>410.000.000</b>	
<b>I.</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang Saluran Drainase</b>	<b>74 %</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan direhabilitasi</b>		<b>410.000.000</b>	
1.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang dibangun	1.222 Meter	1.100.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DPUTR	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun		-	
2.	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang terpelihara	8.333 Meter	1.500.000.000	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	DPUTR	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang		250.000.000	

No	Rancangan awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							direhabilitasi/dipelihara			
3.	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang terpelihara	2.000 Meter	900.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	DPUTR	Panjang saluran drainase yang dipelihara		160.000.000	
<b>G.</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>			<b>16.955.000.000</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Persentase bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik Sesuai Tertib Administrasi Tata Bangunan</b>		<b>7.355.000.000</b>	
<b>I.</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Jumlah dokumen rekomendasi penyelenggaraan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</b>		<b>16.955.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Jumlah gedung perkantoran yang dibangun (lanjutan)</b>		<b>7.355.000.000</b>	
1.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)	Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Pendataan Bangunan Gedung Negara Rekomendasi IMB Rekomendasi SLF	1 dokumen 50 dokumen 20 dokumen	150.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG)	DPUTR	Jumlah dokumen rekomendasi penyelenggaraan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)		100.000.000	
							Jumlah dokumen rekomendasi penyelenggaraan			

No	Rancangan awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)			
							Jumlah dokumen pendataan Bangunan Gedung Negara			
2.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Aula Bappeda Kab. Pemalang	Pembangunan kantor kelurahan widuri Pembangunan Pendopo Kecamatan Terpadu Bodeh	1 unit 1 unit 1 unit	15.745.000.000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota DPUTR		Jumlah gedung perkantoran yang dibangun (lanjutan)		5.751.000.000	
							Jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun			
							Jumlah dokumen perencanaan bangunan gedung pemerintah yang disusun			
3.	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaporan Perkembangan Progres Pembangunan Yang Diselenggarakan	1 dokumen	30.000.000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	DPUTR	Jumlah dokumen pelaporan perkembangan progres pembangunan yang diselenggarakan		-	
4.	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Gedung Kantor/ Rumah Dinas	3 unit	1.030.000.000	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	DPUTR	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi		504.000.000	

No	Rancangan awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							Jumlah dokumen perencanaan yang disusun			
							Jumlah dokumen pengawasan yang disusun			
H.	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>			<b>210.000.000</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	DPUTR	<b>Persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya dengan peraturan dan perencanaan tata bangunan</b>		<b>225.000.000</b>	
I.	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>4.875.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	DPUTR	<b>Jumlah kawasan yang dibangun/ditata</b>		<b>225.000.000</b>	
1.	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Halaman dan Lansecap Gedung BKD Kabupten Pemalang Penataan Halaman Timur Tribun Stadion Mochtar	1 paket	4.875.000.000	Penataan Bangunan dan Lingkungan Penataan	DPUTR	jumlah bangunan dan lingkungannya yang dibangun dalam kawasan yang terencana		225.000.000	
I.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik</b>	<b>65 %</b>	<b>104.649.601.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	DPUTR	<b>Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap</b>		<b>65.887.200.000</b>	
I.	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap</b>	<b>75 %</b>	<b>104.649.601.000</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Persentase</b>	DPUTR	<b>Prosentase Kondisi Jalan dalam Kondisi Mantap</b>		<b>65.887.200.000</b>	

No	Rancangan awal RKPd				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							<b>Prosentase Kondisi Jembatan dalam Kondisi Mantap</b>			
1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	418.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	DPUTR	Jumlah Dokumen Perencanaan penyelenggaraan jalan dan jembatan yang disusun		-	
2.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Survey	2 Dokumen	750.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	DPUTR	Jumlah Dokumen Survey		720.000.000	
3.	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan Yang dilebarkan	3.5 Km	3.000.000.000	Pelebaran Jalan Menuju Standar	DPUTR	Panjang Jalan yang dilebarkan		2.140.000.000	
4.	Rekonstruksi Jalan Panjang	Rekonstruksi Jalan Kabupaten	20 Km	40.000.000.000	Rekonstruksi Jalan	DPUTR	Panjang Rekonstruksi Jalan Kabupaten		30.935.200.000	
5.	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang di Rehabilitasi	2 Km	3.000.000.000	Rehabilitasi Jalan	DPUTR	Panjang Jalan yang di Rehabilitasi		-	
6.	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang di Pelihara Secara Berkala	7 Km	10.000.000.000	Pemeliharaan Berkala Jalan	DPUTR	Panjang Jalan yang di Pelihara Secara Berkala		-	
7.	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Jalan yang dipelihara Secara Rutin	150 Paket	35.000.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	DPUTR	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin		31.702.000.000	
8.	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	5 Unit	5.481.601.000	Pembangunan Jembatan	DPUTR	Jumlah jembatan yang terbangun		390.000.000	



No	Rancangan awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9.	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dilebarkan	2 Unit	1.000.000.000	Pelebaran Jembatan	DPUTR	Jumlah Jembatan Kabupaten yang dilebarkan			-
10.	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang di Rehabilitasi	2 Unit	1.000.000.000	Rehabilitasi Jembatan	DPUTR	Jumlah Jembatan yang di Rehabilitasi			-
11.	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang di Pelihara Secara Rutin	4 Unit	1.000.000.000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	DPUTR	Jumlah Jembatan yang di Pelihara			-
12.	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang di Pelihara Secara Berkala	2 Unit	2.000.000.000	Pemeliharaan Berkala Jembatan	DPUTR	Jumlah Jembatan yang di Pelihara Secara Berkala			-
13.	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah Jalan/Jembatan yang di Tangani	8 Paket	2.000.000.000	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	DPUTR	Jumlah Jalan/Jembatan yang di Tangani			-
<b>J.</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>			<b>530.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi</b>			<b>80.000.000</b>
<b>I.</b>	<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>				<b>Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Jumlah Tenaga Terampil konstruksi yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat</b>			-
1.	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga Terampil yang terlatih	50 peserta	50.000.000	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	DPUTR	Jumlah Tenaga Terampil yang mengikuti pelatihan			-
2.	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga Terampil yang Bersertifikat	50 peserta	50.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	DPUTR	Jumlah Tenaga Terampil konstruksi yang Bersertifikat			-
<b>II.</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi</b>			<b>130.000.000</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Jumlah jenis informasi tingkat kabupaten pada</b>			<b>80.000.000</b>

No	Rancangan awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>sistem informasi jasa konstruksi (SIPJAKI)</b>			
1.	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Jasa Kosntruksi	1 dokumen	130.000.000	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	DPUTR	Jumlah Data dan Informasi Terkait Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi yang disusun		80.000.000	
<b>III.</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>	<b>Jumlah Naskah Akademik/ Peraturan terkait Penyelenggaraan IUJK yang tersusun</b>		<b>150.000.000</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Jumlah pemantauan dan evaluasi penerbitan IUJK yang diterbitkan</b>		-	
1.	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Jasa Kosntruksi	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	DPUTR	Jumlah dokumen Penyusunan Naskah Akademik Perbup Pelaksanaan IUJK yang disusun		-	
2.	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Rekomendasi, pemantauan dan evaluasi penerbitan IUJK	60 Rekomendasi	50.000.000	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	DPUTR	Jumlah pemantauan dan evaluasi penerbitan IUJK yang diterbitkan		-	
<b>IV.</b>	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>			<b>150.000.000</b>	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Jumlah pelatihan tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>		-	
							<b>Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha Jasa Konstruksi</b>			
							<b>Jumlah alat pengelasan</b>			

No	Rancangan awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							<b>konstruksi yang disediakan</b>			
1.	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pelatihan pada personal/ instansi terkait tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100 peserta	150.000.000	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	DPUTR	Jumlah peserta pelatihan terkait tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			-
		PNS/ staf yang terlatih tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	5 peserta				PNS/ staf yang terlatih tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
2.	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Pengadaan alat pengelasan konstruksi			
<b>K.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>			<b>500.000.000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Persentase pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah</b>		<b>200.000.000</b>	
<b>I.</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>			<b>165.000.000</b>	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>DPUTR</b>	<b>Persentase Peraturan rencana detail tata ruang yang diterbitkan</b>		<b>30.000.000</b>	
1.	Penetapan Kebijakan dalam	tersedianya kajian kebijakan	1 Buah	120.000.000	Penetapan Kebijakan dalam rangka	DPUTR			30.000.000	

No	Rancangan awal RKP				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	pemanfaatan ruang di Kabupaten Pemalang			Pelaksanaan Penataan Ruang					
2.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan Penataan Ruang	1 kali	45.000.000	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang DPUTR					
<b>II.</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>100.000.000</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DPUTR</b>			<b>100.000.000</b>	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	tersusunnya dokumen materi teknis RDTRK Kawasan Perkotaan	1 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	DPUTR			100.000.000	
<b>III.</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>155.000.000</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>DPUTR</b>				
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	tersedianya layanan ITR bagi masyarakat	12 Bulan	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	DPUTR				
2.	Sistem Informasi Penataan Ruang	tersedianya sarana informasi dan pelayanan bidang penataan ruang	1 Buah		Sistem Informasi Penataan Ruang	DPUTR			55.000.000	
<b>IV.</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan</b>			<b>80.000.000</b>	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	<b>DPUTR</b>			<b>70.000.000</b>	

No	Rancangan awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Kajian Evaluasi Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Pemalang	1 Dokumen	80.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	DPUTR			70.000.000	

## II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dinamika masyarakat dengan tujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah antar ruang antar waktu antar proses perencanaan yang terintegrasi yaitu memadu serasikan antara program pemerintah pusat, provinsi, sasaran RPJMD Kabupaten, Renstra DPUTR maupun usulan program /kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, kelompok masyarakat, hasil Musrenbang, Forum PD, Konsultasi publik, Reses anggota dewan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun Dinas/instansi terkait yang diarahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang, hal ini dilakukan agar proses pembangunan bisa berjalan secara efektif, efisien, tepat sasaran dan sesuai dengan kehendak rakyat. Berikut ini usulan dari masyarakat melalui mekanisme Musrenbang maupun usulan dari pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel II.7 :**  
Program/kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten pemalang Tahun 2022

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
1	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bojongbata - Sumberharjo	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
2	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sumberharjo - Banjarmulya	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
3	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kebondalem - Caur	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
4	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sukun	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
5	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Siwalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
6	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pisang	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
7	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Merak	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
8	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sonokeling	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
9	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Veteran	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
10	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cisadane	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
11	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gurami	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
12	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wijaya Kusuma	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
13	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cempedak	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> </ul>

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
							➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
14	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Semeru	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
15	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sumbing	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
16	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bromo	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
17	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Comal - Tumbal	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Comal	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
18	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Banjarnyar - Penusupan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Randudongkal	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
19	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tidore	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
20	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Prenjak	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
21	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Klengkeng	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
22	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Elang	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S.IP	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan



NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
23	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lumba - Lumba	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S,IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
24	Pemeliharaan Ruas Jalan Salak	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S,IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
25	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Penakir - Dukuh Tumbu	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pulosari	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S,IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
26	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Batusari - Clekatakan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pulosari	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S,IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
27	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pala	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S,IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
28	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kedondong	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	TATANG KIRANA,S,IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
29	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Paduraksa - Lobongkok	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	SRI AMI AYUWARDANI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
30	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tangkuban Prah	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	SRI AMI AYUWARDANI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
31	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Paduraksa - Sungapan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	SRI AMI AYUWARDANI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
32	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kulbanda	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Taman	200.000.000	800 m2	RINALDI FK,SH	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> </ul>

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
							➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
33	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gatotkaca	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Taman	200.000.000	800 m2	RINALDI FK,SH	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
34	Pemeliharaan Ruas Jalan Bali	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Taman	200.000.000	800 m2	RINALDI FK,SH	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
35	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sangihe	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Taman	200.000.000	800 m2	RINALDI FK,SH	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
36	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pesucen - Sidokare	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Ampelgading	200.000.000	800 m2	Hj. ELI RIYANTI	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
37	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Iser - Kendalsari	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Petarukan	200.000.000	800 m2	Hj. ELI RIYANTI	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
38	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tegalmlati - Loning	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Petarukan	200.000.000	800 m2	Hj. ELI RIYANTI	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
39	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cibiyuk - Ampelgading	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Comal	200.000.000	800 m2	Drs. BAMBANG SETIJONO	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
40	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Comal baru - Cibiyuk	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Ampelgading	200.000.000	800 m2	Drs. BAMBANG SETIJONO	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
41	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ujunggede - Blimbing	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Comal	200.000.000	800 m2	Drs. BAMBANG SETIJONO	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
42	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Mojo - Blendung	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Comal	200.000.000	800 m2	CASUDI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
43	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Blendung - Kertosari	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Ulujami	200.000.000	800 m2	CASUDI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
44	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Purwoharjo - Purwosari	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Comal	200.000.000	800 m2	Hj.NURYANI,SH., MH	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
45	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Klegen - Kebojongan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Comal	200.000.000	800 m2	Hj.NURYANI,SH., MH	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
46	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Susukan - Mojo	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Comal	200.000.000	800 m2	Hj.NURYANI,SH., MH	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
47	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Susukan - Pagergunung	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Comal	200.000.000	800 m2	RESTU MARLIA RIZKY,S.Ked	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
48	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pesantren - Sidomulyo	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Ulujami	200.000.000	800 m2	RESTU MARLIA RIZKY,S.Ked	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
49	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pamutih - Padek	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Ulujami	200.000.000	800 m2	RESTU MARLIA RIZKY,S.Ked	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
50	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Beluk - Kalitengah	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Ulujami	200.000.000	800 m2	INDIANTO, SH	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> <li>➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan</li> </ul>
51	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kuta - Gunungjaya	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Belik	200.000.000	800 m2	INDIANTO, SH	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP</li> </ul>

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
							➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
52	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cikendung - Siremeng	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pulosari	200.000.000	800 m2	H.WASISTO,SH	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
53	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Penakir - Dukuh Sigeblok	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pulosari	200.000.000	800 m2	H.WASISTO,SH	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
54	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gambuhan - Jurangmangu	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pulosari	200.000.000	800 m2	H.WASISTO,SH	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
55	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kalisaleh - Sodong	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Belik	200.000.000	800 m2	LINDA DWI BHUANA PUTRI S.H	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
56	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sikasur - Kalipaku	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Belik	200.000.000	800 m2	LINDA DWI BHUANA PUTRI S.H	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
57	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lenggerong - Glandang	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Bantarbolang	200.000.000	800 m2	BUDI HARMANTO,S.P d	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan
58	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lodaya - Kalimas	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Randudongkal	200.000.000	800 m2	DWI LAKSARI, S.Pd.	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
59	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kejene - Gongseng	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Randudongkal	200.000.000	800 m2	DWI LAKSARI, S.Pd.	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PDIP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
60	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Wiyorowetan - Pasar Sruwet	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Ulujami	200.000.000	800 m2	H. TURAH RAHARJO	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PKB ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
61	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Mendelem - Simpuri	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Belik	200.000.000	800 m2	SUBUR MUSHOLEH	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PKB ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
62	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Mendelem - Kuta	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Belik	200.000.000	800 m2	SUBUR MUSHOLEH	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PKB ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
63	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pulosari - Siremeng	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pulosari	200.000.000	800 m2	SUBUR MUSHOLEH	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PKB ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
64	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gapura - Wanarata	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Watukumpul	200.000.000	800 m2	SUBUR MUSHOLEH	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PKB ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
65	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Siremeng - Dukuh Kantong	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pulosari	200.000.000	800 m2	SUBUR MUSHOLEH	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PKB ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
66	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Medayu - Gejos	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Watukumpul	200.000.000	800 m2	SUBUR MUSHOLEH	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PKB ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
67	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Temuireng - Kendaldoyong	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Petarukan	200.000.000	800 m2	H. NURUL HUDA S.Pd	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PKB ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
68	Pengaspalan Jalan Penghubung Desa Clekatakan Kec. Pulosari, Kab. Pemalang - Perbatasan Kabupaten Purbalingga	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pulosari	200.000.000	800 m2	SUTI'AH, S.H.	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PKB ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
69	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lingkar Watukumpul	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Watukumpul	200.000.000	800 m2	SUWARNO	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PKB ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
70	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Serayu	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	Hj.NURHIDAYAT I	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PKB

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
							➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
71	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cimanuk	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	Hj.NURHIDAYAT I	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PKB ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
72	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan samanhudi	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	150.000.000	600 m2	Hj.NURHIDAYAT I	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PKB ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
73.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sirangkang - Karangasem	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Ampelgading	140.000.000	560 m2	AHMAD SUYANTO	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GERINDRA ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
74	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Petarukan - Klareyan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Petarukan	200.000.000	800 m2	AHMAD SUYANTO	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GERINDRA ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
75	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Widodaren - Karangasem	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Petarukan	140.000.000	560 m2	AHMAD SUYANTO	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GERINDRA ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
76	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bangka	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Taman	200.000.000	800 m2	TATI SUSIATI	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GERINDRA ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
77	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Seram	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Taman	200.000.000	800 m2	TATI SUSIATI	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GERINDRA ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
78	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Petarukan - Gondang	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Petarukan / Taman	200.000.000	800 m2	TATI SUSIATI	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GERINDRA ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
79	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sriti	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	BASKORO	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GERINDRA ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
80	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Slamet Riyadi	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	150.000.000	600 m2	BASKORO	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GERINDRA ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
81	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Melon	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	150.000.000	600 m2	BASKORO	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GERINDRA ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
82	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kandang - Pesantren	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Ulujami	200.000.000	800 m2	H.M. WARDOYO, S.E.	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GERINDRA ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
83	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ambowetan - Kaliprau	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Ulujami	175.000.000	700 m2	H.M. WARDOYO, S.E.	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GERINDRA ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
84	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lingkar Kota Comal	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Comal	175.000.000	700 m2	H.M. WARDOYO, S.E.	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GERINDRA ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
85	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sidorejo - Sikayu	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Comal	175.000.000	700 m2	H.M. WARDOYO, S.E.	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GERINDRA ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
86	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kelangdepok - Muncang	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Bodeh	150.000.000	600 m2	H.M. WARDOYO, S.E.	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GERINDRA ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
87	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lingkar Randudongkal	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Randudongkal	150.000.000	600 m2	IDA MULYANI, A.Md.	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GERINDRA ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
88	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kreyo - Mereng	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Moga	150.000.000	600 m2	IDA MULYANI, A.Md.	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GERINDRA ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
89	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pegiringan - Wanarata	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Bantarbolang	200.000.000	800 m2	IDA MULYANI, A.Md.	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GERINDRA ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
90	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Karang Sari - Gunungsari	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pulosari	200.000.000	800 m2	SUSI HERNINGTYAS	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GERINDRA ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
91	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Batusari (Dk. Krajan) - Cemara II	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pulosari	200.000.000	800 m2	SUSI HERNINGTYAS	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GERINDRA ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
92	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Walangsanga - Mandiraja	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Moga	200.000.000	800 m2	SUSI HERNINGTYAS	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GERINDRA ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
93	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Jebed - Sungapan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Taman	150.000.000	600 m2	RABADI	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
94	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kerinci	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Taman	130.000.000 k	520 m2	RABADI	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
95	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Werkudoro	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Taman	200.000.000	800 m2	RABADI	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR



NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
							➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
96	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lombok	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Taman	150.000.000	600 m2	RABADI	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
97	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kedunggong - Medayu	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Bodeh	140.000.000	560 m2	EDI SUSILO, S.H	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
98	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Cangak - Kebandungan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Bodeh	200.000.000	800 m2	EDI SUSILO, S.H	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
99	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bodeh - Jatiroyom	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Bodeh	200.000.000	800 m2	EDI SUSILO, S.H	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
100	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Karangbrai - Jatiroyom	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Bodeh	150.000.000	600 m2	EDI SUSILO, S.H	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
101	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lingkar Bantarbolang	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Bantarbolang	150.000.000	600 m2	DYAH WIDIHARTI	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
102	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bantarbolang - Sarwodadi	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Bantarbolang	200.000.000	800 m2	DYAH WIDIHARTI	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
103	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kalimas - Kejene	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Randudongkal	130.000.000	520 m2	DYAH WIDIHARTI	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
104	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kepodang	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	HM. ROIS FAISAL MS, S.Pd. I, M.Si	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
105	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan RE. Martadinata	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	HM. ROIS FAISAL MS, S.Pd. I, M.Si	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
106	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Objek Wisata Widuri - Tanjungsari	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	HM. ROIS FAISAL MS, S.Pd. I, M.Si	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
107	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sawit	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	HM. ROIS FAISAL MS, S.Pd. I, M.Si	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
108	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ir. Sutami	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	HM. ROIS FAISAL MS, S.Pd. I, M.Si	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
109	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Maluku	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	HM. ROIS FAISAL MS, S.Pd. I, M.Si	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
110	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tegalsari - Kemuning	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Ampelgading	200.000.000	800 m2	RISMANTO	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
111	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Blimbing - Kendalsari	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Petarukan / Comam	130.000.000	800 m2	RISMANTO	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
112	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Jatirejo - Panjunan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Petarukan	150.000.000	600 m2	RISMANTO	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
113	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Watukumpul - Cikadu	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Watukumpul	200.000.000	800 m2	Drs. H. MASRUKHIN AHMADI	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
114	Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong depan Pasar Belik	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang	Belik	200.000.000	1066,09 m	Drs. H. MASRUKHIN AHMADI	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
		direhabilitasi/d ipelihara					➤ Sub kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
115	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gombang - Belik	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pulosari	140.000.000	560 m2	Drs. H. MASRUKHIN AHMADI	➤ Usulan Pokir dari Fraksi GOLKAR ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
116	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pedurungan - Serang	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Taman	200.000.000	800 m2	A ROUSUL AMIR AL MALIK, S.T	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PPP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
117	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tasikrejo - Pamutih	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Ulujami	200.000.000	800 m2	KASMINTO, S.H	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PPP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
118	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan KH. Samanhudi	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	M MAHBUB DJUNAIDI, S.E.,M.Si	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PPP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
119	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Citarum	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	M MAHBUB DJUNAIDI, S.E.,M.Si	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PPP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
120	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Mandala 1,2, 3	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	100.000.000	400 m2	M MAHBUB DJUNAIDI, S.E.,M.Si	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PPP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
121	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bantarbolang - Glandang	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Bantarbolang	200.000.000	800 m2	H. KHODORI, S.Ag	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PPP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
122	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Bantarbolang - Kalitorong	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Bantarbolang	200.000.000	800 m2	H. KHODORI, S.Ag	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PPP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
123	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Warungpring - Tegalarja	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Moga	200.000.000	800 m2	H. KHODORI, S.Ag	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PPP

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
							➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
124	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kalimas - Kalitorong	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Randudongkal	200.000.000	800 m2	H. KHODORI, S.Ag	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PPP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
125	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kalitorong - Randudongkal	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Randudongkal	200.000.000	800 m2	H. KHODORI, S.Ag	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PPP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
126	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kecepat - Kalisaleh	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Belik	200.000.000	800 m2	H. KHODORI, S.Ag	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PPP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
127	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Semingkir - Majakerta	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Randudongkal/ Watukumpul	200.000.000	800 m2	H. KHODORI, S.Ag	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PPP ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
128	Bronjong Sungai siraja wilayah simpedang Pegirangan	Panjang tebing yang dibangun	Randudongkal	200.000.000	700 M	H. KHODORI, S.Ag	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PPP ➤ Sub kegiatan Pembangunan Bangunan perkuatan tebing
129	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Penggarit - Tegalsari	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Taman	200.000.000	800 m2	SOLIKHIN,S.Ag	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PKS ➤ Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
130	Pembuatan Tempat Sampah Desa Penggarit	Jumlah TPA/TPST/TPS /SPA/TPS3R/ yang dibangun	Taman	100.000.000	1 Unit	SOLIKHIN,S.Ag	➤ Usulan Pokir dari Fraksi PKS ➤ Sub kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
131	Rekonstruksi Jalan Ambowetan - Tumbal	Panjang rekonstruksi jalan kabupaten	Comal	5.492.548.521	10.985 m2	-	➤ DAK Reguler Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
132.	Rekonstruksi Jalan Blimbing - Kebandaran	Panjang rekonstruksi jalan kabupaten	Ampelgading	3.134.379.479	6.268,76 m <sup>2</sup>	-	➤ DAK Reguler Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
133.	Rekonstruksi Jalan Comal - Bodeh	Panjang rekonstruksi jalan kabupaten	Comal	7.000.000.000	14.000 m <sup>2</sup>	-	➤ DAK Reguler Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
134.	Rekonstruksi Jalan Gejos - Tlagasana	Panjang rekonstruksi jalan kabupaten	Watukkumpul	2.000.000.000	4.000 m <sup>2</sup>	-	➤ Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
135.	Rekonstruksi Jalan Kalirandu - Temuireng	Panjang rekonstruksi jalan kabupaten	Petarukan	3.888.272.000	7.776,55 m <sup>2</sup>	-	➤ DAK Tematik/Penugasan Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
136.	Rekonstruksi Jalan Klareyan - Pesantren	Panjang rekonstruksi jalan kabupaten	Petarukan	3.000.000.000	6.000 m <sup>2</sup>	-	➤ DAK Tematik/Penugasan Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
137.	Rekonstruksi Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Jend. Sudirman	Panjang rekonstruksi jalan kabupaten	Pemalang	1.200.000.000	2.400 m <sup>2</sup>	-	➤ Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
138.	Rekonstruksi Jalan Tasikrejo - Ulujami	Panjang rekonstruksi jalan kabupaten	Ulujami	4.320.000.000	8.640 m <sup>2</sup>	-	➤ DAK Reguler Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
139.	Pelebaran Jalan D.I. Panjaitan	Panjang jalan yang dilebarkan	Pemalang	2.000.000.000	4.000 m <sup>2</sup>	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar
140.	Rehabilitasi Jembatan Kemuning dan Jembatan Wisnu	Jumlah jembatan yang terbangun	Watukkumpul	100.000.000	2 unit	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
141.	Rehabilitasi Jembatan Layangan	Jumlah jembatan yang terbangun	Bodeh	200.000.000	1 unit	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
142.	Pembangunan Jalan Perum Pemalang Indah	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m <sup>2</sup>	-	➤ DAU Th. 2022

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
	Regency 6 RW 18 Bojongbata						➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
143.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Abiyasa I	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Taman	100.000.000	400 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
144.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ambowetan - Rowosari	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Comal	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
145.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Balitung	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
146.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Belik - Watukumpul	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Watukumpul	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
147.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Blandong - Purwoharjo	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Comal	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
148.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Dr. Cipto mangunkusumo	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	100.000.000	400 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
149.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gandulan - Kedungbanjar	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Taman	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
150.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Gondang - Kendalsari	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Petarukan	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
151.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan HOS. Cokroaminoto	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	100.000.000	400 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
152.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Irian Jaya	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
153.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kalipaku - Simpur	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Belik	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
							➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
154.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Karangmoncol - Tanahbaya	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Randudongkal	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
155.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Karangsari - Pulosari	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pulosari	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
156.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Karimun Jawa	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
157.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kedungbanjar - Asemdayong	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
158.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kendalsari - Jebed	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Petarukan	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
159.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kendalsari - Sikuang	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Petarukan	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
160.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kendalsari - Tegalsari	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Petarukan	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
161.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan KH. Wachid Hasyim	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
162.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Komodo	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Taman	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
163.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Langsep	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
164.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lingkar Petarukan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Petarukan	100.000.000	400 m2	-	➤ DAU Th. 2022

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
							➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
165.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Lingkar Ulujami	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Ulujami	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
166.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Loning - Klareyan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Petarukan	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
167.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Moga - Pulosari	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pulosari	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
168.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pagergunung - Ambowetan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Ulujami	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
169.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Pegundan - Temuireng	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Petarukan	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
170.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Petarukan - sikentung	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Petarukan	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
171.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sindoro	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	100.000.000	400 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
172.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Sungapan - Penggarit	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Taman	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
173.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Tentara Pelajar	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
174.	Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Ternate	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	Pemalang	200.000.000	800 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
175.	Rehabilitasi DI. Kedungbelis	Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi	Belik	1.480.280.000	- 379 meter saluran	-	➤ DAK Th. 2022



NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
					- 6 bh bangunan sadap - 1 bh bendung - 97,53 ha (outcome)		➤ Sub Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
176.	Rehabilitasi DI. Rowokajar	Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi	Belik	671.759.000	- 309 meter saluran - 7 bh bangunan sadap - 1 bh bendung - 29,79 ha (outcome)	-	➤ DAK Th. 2022 ➤ Sub Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
177.	Konsultan pengawas DAK Th. 2022	Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi	-	100.000.000	1 paket	-	➤ DAK Th. 2022 ➤ Sub Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
178.	Rehabilitasi saluran tersier B.Tg.1	Jumlah Daerah Irigasi yang direhabilitasi	Ampelgading	200.000.000	50 meter	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
179.	Pembuatan atap kanopi Masjid Agung Pemalang	Jumlah bangunan dan lingkungannya yg dibangun dlm Kawasan yg terencana	Pemalang	100.000.000	15,92 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Penataan Bangunan dan Lingkungannya
180.	Pengawasan Pembuatan atap kanopi Masjid Agung Pemalang	Jumlah bangunan dan lingkungannya yg dibangun dlm Kawasan yg terencana	Pemalang	10.000.000	1 paket	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Penataan Bangunan dan Lingkungannya
181.	Pemeliharaan Stadion Mochtar	Jumlah bangunan dan lingkungannya yg dibangun dlm Kawasan yg terencana	Pemalang	115.000.000	17,85 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Penataan Bangunan dan Lingkungannya
182.	Lanjutan Pembangunan Aula Kodim 0711 Pemalang (dan pengawasan dan perencanaan)	Jumlah Gedung yang dibangun	Pemalang	222.000.000	31,85 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab./Kota
183.	Pembangunan gedung kantor barang bukti rampasan dan tilang Kejaksaan Negeri (dan pengawasan)	Jumlah Gedung yang dibangun	Pemalang	934.000.000	143,32 m2	-	➤ DAU Th. 2022 ➤ Sub Perencanaan, Pembangunan,

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
							Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab./Kota
184.	Pembangunan rumah dinas Kapolres dan Wakapolres Pemalang (dan pengawasan)	Jumlah Gedung yang dibangun	Pemalang	2.940.000.000	457,00 m2	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DAU Th. 2022</li> <li>➤ Sub Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab./Kota</li> </ul>
185.	Rehabilitasi Gedung Makodim 0711 Pemalang (dan pengawasan)	Jumlah Gedung yang dibangun	Pemalang	1.389.000.000	214,00 m2	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DAU Th. 2022</li> <li>➤ Sub Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kab./Kota</li> </ul>
186.	Rehabilitasi pos jaga rumah Dinas Setda Kab. Pemalang	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	Pemalang	45.000.000	9,76 m2	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DAU Th. 2022</li> <li>➤ Sub Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai bangunan Gedung utk kepent.strategis kab./kota</li> </ul>
187.	Rehabilitasi kantor Kejaksaan Negeri Pemalang (termasuk pengawasan dan perenc)	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	Pemalang	222.000.000	31,85 m2	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DAU Th. 2022</li> <li>➤ Sub Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai bangunan Gedung utk kepent.strategis kab./kota</li> </ul>
188.	Rehabilitasi Pagar kompleks rumah dinas pimpinan Polres Pemalang dan TK (termasuk pengawasan dan perenc)	Jumlah Gedung yang direhabilitasi	Pemalang	222.000.000	31,85 m2	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DAU Th. 2022</li> <li>➤ Sub Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai bangunan Gedung utk kepent.strategis kab./kota</li> </ul>
189.	Penyusunan AHSP	Jumlah data dan informasi terkait Analisa Harga Satuan Pekerjaan	Pemalang	80.000.000	1 paket	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DAU Th. 2022</li> <li>➤ Sub Penyusunan data dan informasi</li> </ul>

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
		Konstruksi yg disusun					ketersediaan/pe nggunaan material dan peralatan
190.	Pembangunan Tangkiseptik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Bumirejo Kec.Ulujami	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun	Ulujami	420.000.000	60 unit	-	➢ DAK Th. 2022 ➢ Sub Pembangunan/P enyediaan SPALT skala permukiman
191.	Pembangunan Tangkiseptik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Kalipraou Kec. Ulujami	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun	Ulujami	420.000.000	60 unit	-	➢ DAK Th. 2022 ➢ Sub Pembangunan/P enyediaan SPALT skala permukiman
192.	Pembangunan Tangkiseptik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Nyamplungsari Kec.Petarukan	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun	Petarukan	420.000.000	60 unit	-	➢ DAK Th. 2022 ➢ Sub Pembangunan/P enyediaan SPALT skala permukiman
193.	Pembangunan tangkiseptik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Pagongsoran Kec.Pemalang	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun	Pemalang	420.000.000	60 unit	-	➢ DAK Th. 2022 ➢ Sub Pembangunan/P enyediaan SPALT skala permukiman
194.	Pembangunan Tangkiseptik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Tundagan Kec. Watukumpul	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun	Pemalang	420.000.000	60 unit	-	➢ DAK Th. 2022 ➢ Sub Pembangunan/P enyediaan SPALT skala permukiman
195.	Pembangunan Tangkiseptik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK Desa Banjaran Kec. Taman	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun	Taman	350.000.000	70 unit	-	➢ DAK Th. 2022 ➢ Sub Pembangunan/P enyediaan SPALT skala permukiman
196.	Pembangunan Tangkiseptik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK Kel. Petarukan Kec. Petarukan	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun	Petarukan	350.000.000	70 unit	-	➢ DAK Th. 2022 ➢ Sub Pembangunan/P enyediaan SPALT skala permukiman
197.	Pembangunan Tangkiseptik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala	Pemalang	350.000.000	70 unit	-	➢ DAK Th. 2022 ➢ Sub Pembangunan/P

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
	Kelurahan Bojongsata Kec. Pemalang	permukiman yang dibangun					enyediaan SPALT skala permukiman
198.	Pembangunan Tangkispetik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK Kel. Wanarejan Selatan Kec. Taman	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun	Taman	350.000.000	70 unit	-	➤ DAK Th. 2022 ➤ Sub Pembangunan/P enyediaan SPALT skala permukiman
199.	Pembangunan TPS3R Desa Karang Sari Kec. Pulosari	Jumlah pengelolaan sampah yang dibangun	Pulosari	600.000.000	85 unit	-	➤ DAK Th. 2022 ➤ Sub Pembangunan/P enyediaan SPALT skala permukiman
200.	Pembangunan Tangkiseptik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK Desa Tambakrejo Kec. Pemalang	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun	Pemalang	350.000.000	70 unit	-	➤ DAK Th. 2022 ➤ Sub Pembangunan/P enyediaan SPALT skala permukiman
201.	Pembangunan TPS3R Desa Cawet Kec. Watukumpul	Jumlah pengelolaan sampah yang dibangun	Watukumpul	600.000.000	85 unit	-	➤ DAK Th. 2022 ➤ Sub Pembangunan/P enyediaan SPALT skala permukiman
202.	Pemeliharaan saluran drainase perkotaan pemalang	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang direhabilitasi/d ipelihara	Pemalang	50.000.000	1 paket	-	➤ DAU Tah.2022 ➤ Sub kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
203.	Operasi dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong UPJI Wilayah I s/d VIII	Panjang saluran drainase yang dipelihara	Pemalang, Belik, Moga, Rddkl, Warungpring, Comal, Petarukan, Bantarbolang	160.000.000	8 paket	-	➤ DAU Tah.2022 ➤ Sub kegiatan Operasi dan pemeliharaan system drainase
204.	Jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan SPAM jaringan perpipaan perdesaan	Panjang jaringan air bersih yg ditingkatkan		85.000.000		-	➤ DAU Tah.2022 ➤ Sub kegiatan peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kwsn perdesaan
205.	Pengembangan SPAM jaringan perpipaan Desa Bumirejo Kec. Ulujami	Panjang jaringan air bersih yg ditingkatkan	Ulujami	100.000.000	6,25 m	-	➤ DAU Tah.2022 ➤ Sub kegiatan peningkatan SPAM jaringan

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
							perpipaan di kwsn perdesaan
206.	Pengembangan SPAM jaringan perpipaan Desa Gandu Kec. Comal	Panjang jaringan air bersih yg ditingkatkan	Comal	100.000.000	6,25 m	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ DAU Tah.2022</li> <li>➢ Sub kegiatan peningkatan SPAM jar perpipaan di kwsn perdesaan</li> </ul>
207.	Pengembangan SPAM jaringan perpipaan Desa Gunungsari Kec. Pulosari	Panjang jaringan air bersih yg ditingkatkan	Pulosari	100.000.000	6,25 m	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ DAU Tah.2022</li> <li>➢ Sub kegiatan peningkatan SPAM jar perpipaan di kwsn perdesaan</li> </ul>
208.	Perluasan SPAM jaringan perpipaan Desa Gambuhan Kec. Pulosari	Panjang jaringan air bersih yg ditingkatkan	Pulosari	328.000.000	2238,90 m	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ DAK Tah.2022</li> <li>➢ Sub kegiatan peningkatan SPAM jar perpipaan di kwsn perdesaan</li> </ul>
209.	Perluasan SPAM jaringan perpipaan Desa Gongseng Kec. Randudongkal	Panjang jaringan air bersih yg ditingkatkan	Randudongkal	200.000.000	1365,19 m	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ DAK Tah.2022</li> <li>➢ Sub kegiatan peningkatan SPAM jar perpipaan di kwsn perdesaan</li> </ul>
210.	Perluasan SPAM jaringan perpipaan Desa Klareyan Kec. Petarukan	Panjang jaringan air bersih yg ditingkatkan	Petarukan	400.000.000	2730,37 m	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ DAK Tah.2022</li> <li>➢ Sub kegiatan peningkatan SPAM jar perpipaan di kwsn perdesaan</li> </ul>
211.	Perluasan SPAM jaringan perpipaan Desa Pabuaran Kec. Bantarbolang	Panjang jaringan air bersih yg ditingkatkan	Bantarbolang	200.000.000	1365,19 m	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ DAK Tah.2022</li> <li>➢ Sub kegiatan peningkatan SPAM jar perpipaan di kwsn perdesaan</li> </ul>
212.	Perluasan SPAM jaringan perpipaan Desa Iser Kec. Petarukan	Panjang jaringan air bersih yg ditingkatkan	Petarukan	200.000.000	1365,19 m	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ DAK Tah.2022</li> <li>➢ Sub kegiatan peningkatan SPAM jar perpipaan di kwsn perdesaan</li> </ul>
213.	Perluasan SPAM jaringan perpipaan Desa Sarwodadi Kec. Comal	Panjang jaringan air bersih yg ditingkatkan	Comal	200.000.000	1365,19 m	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ DAK Tah.2022</li> <li>➢ Sub kegiatan peningkatan SPAM jar</li> </ul>

NO	PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	NILAI	VOLUME	USULAN	CATATAN
							perpipaan di kwsn perdesaan
214.	Perluasan SPAM jaringan perpipaan Desa Sirangkang Kec. Petarukan	Panjang jaringan air bersih yg ditingkatkan	Petarukan	200.000.000	1365,19 m	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ DAK Tah.2022</li> <li>➢ Sub kegiatan peningkatan SPAM jar perpipaan di kwsn perdesaan</li> </ul>
215.	Penguatan kapasitas KPSPAM Asosiasi BANYU LESTARI	Panjang jaringan air bersih yg ditingkatkan		50.000.000	3125 m	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ DAU Tah.2022</li> <li>➢ Sub kegiatan peningkatan SPAM jar perpipaan di kwsn perdesaan</li> </ul>
216.	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan Desa Tambakrejo Kec. Pml	Panjang jaringan air bersih yg ditingkatkan	Pemalang	100.000.000	6,25 m	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ DAU Tah.2022</li> <li>➢ Sub kegiatan peningkatan SPAM jar perpipaan di kwsn perdesaan</li> </ul>
217.	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan Desa Sidokare Kec. Ampelgading	Panjang jaringan air bersih yg ditingkatkan	Ampelgading	252.000.000	1720,13 m	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ DAU Tah.2022</li> <li>➢ Sub kegiatan peningkatan SPAM jar perpipaan di kwsn perdesaan</li> </ul>
218.	Pembuatan tempat sampah Desa Penggarit Kec. Taman	Jumlah TPA/TPST/TPS /SPA/TPS3R yg dibangun	Taman	100.000.000	14,113 m	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ DAU Tah.2022</li> <li>➢ Sub kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</li> </ul>
219.	Pemeliharaan TPST Kel. Widuri Kec. Pemalang	Jumlah TPA/TPST/TPS /SPA/TPS3R yg direhabilitasi	Pemalang	45.000.000	3,59 m	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ DAU Tah.2022</li> <li>➢ Sub kegiatan Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</li> </ul>
220.	Pemeliharaan Bank sampah Pulosari	Jumlah TPA/TPST/TPS /SPA/TPS3R yg direhabilitasi	Pulosari	45.000.000	1 unit	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ DAU Tah.2022</li> <li>➢ Sub kegiatan Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</li> </ul>
221.	Pengadaan jaringan perpipaan air minum SPAM mata air Samhyang Gorang Ds. Jurangmangu	Panjang jaringan pipa sumber air yg dibangun	Pulosari	450.000.000	28,125 m2	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ DAU Tah.2022</li> <li>➢ Sub kegiatan Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</li> </ul>

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DPUTR**

#### **III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah terbagi menjadi 3, yaitu :**

##### **III.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir.

Adapun keempat pilar RPJMN ke IV tahun 2020-2024 :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga;

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dari keempat pilar tersebut diatas diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan kedalam 7 (tujuh) agenda

pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. 7 (tujuh) agenda pembangunan dimaksud, diantaranya:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Dari ketujuh agenda pembangunan tersebut diatas serta sesuai periode pembangunan yang keempat dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, tema yang diambil pada tahun 2021 dari RPJMD adalah “Peningkatan Derajat Sumber Daya Manusia Berkualitas Menuju Pemalang Sejahtera“, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang akan menfokuskan pada agenda pembangunan sebagaimana adalah Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; melalui peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Pemalang.

### **III.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Propinsi Jawa Tengah**

#### **A. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Arah kebijakan dan strategi Kementerian 2020 – 2024 dirumuskan dalam kerangka pembangunan yang tidak hanya yang dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian, akan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta. Arah kebijakan dan strategi terdiri dari arah kebijakan dan strategi utama pada masing-masing sektor serta arah kebijakan dan strategi lintas sektor.



### **1.2.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Lintas Sektor**

#### ***1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah***

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020 – 2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antarwilayah dengan sasaran antara lain :

- (i) meningkatnya pemerataan antarwilayah (Kawasan Barat Indonesia (KBI), Kawasan Timur Indonesia (KTI), Jawa – Luar Jawa),
- (ii) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat–pusat pertumbuhan wilayah,
- (iii) meningkatnya kualitas, dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah,
- (iv) meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah. Hal tersebut sejalan dengan Visi Misi Presiden 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dimana wilayah menjadi basis pembangunan.

#### ***2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Gender***

Pengarusutamaan Gender di bidang pekerjaan umum dan perumahan dilaksanakan sesuai arahan pengarusutamaan pembangunan di dalam RPJMN 2020 – 2024, di mana strategi pembangunan nasional harus memasukan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kebijakan pengarusutamaan gender akan meliputi:

- (1) Perkuatan komitmen Kementerian PUPR dalam pelaksanaan PUG;
- (2) Peningkatan integrasi gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Kementerian PUPR;
- (3) Peningkatan pelaksanaan “infrastructure for all” yang memenuhi kebutuhan dasar (basic needs), dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan, ramah lingkungan dan berkelanjutan” bagi semua kelompok baik perempuan dan laki-laki-laki, termasuk anak-anak,

lansia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, generasi muda, suku-suku terasing dan kelompok rentan lainnya secara setara dan adil;

- (4) Peningkatan pemenuhan 7 (tujuh) prasyarat pelaksanaan PUG yang terdiri dari peningkatan di bidang: komitmen, kebijakan responsif gender, kelembagaan (POKJA dan Focal Point) di tingkat pusat dan daerah; kapasitas sumber daya, baik sumber daya manusia sumber dana; data terpilah; alat analisa gender (Gender Analysis Pathway/GAP) untuk penyusunan PPRG; peran serta masyarakat dengan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan multi pihak;
- (5) Peningkatan lingkungan dan fasilitas kerja yang responsif gender; dan
- (6) Peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan responsif gender terutama dalam aspek manfaat hasil-hasil pembangunan, termasuk melakukan audit gender untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan PUG.

Kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui strategi:

- (1) Peningkatan penyusunan produk kebijakan/pengaturan yang responsif gender (NSPK);
- (2) Peningkatan dan pengembangan penyediaan dan pemanfaatan data terpilah sebagai alat pemetaan data, identifikasi isu dan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender dan membuat kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender;
- (3) Peningkatan penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG);
- (4) Pengembangan kelembagaan dengan pembentukan Kelompok kerja (POKJA) dan Focal Point, serta peningkatan kapasitas SDM, melalui berbagai program pelatihan gender, PUG dan PPRG di tingkat pusat dan daerah;
- (5) Peningkatan penyebarluasan informasi dan kerjasama dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman lintas sektor dengan melakukan kegiatan

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media cetak, elektronik, pameran, pertemuan-pertemuan, dan lain-lain;

- (6) Pengembangan inovasi-inovasi kegiatan-kegiatan yang responsif gender berdasarkan penelitian, kajian-kajiandan fakta-fakta lapangan;
- (7) Peningkatan kerjasama dengan multi pihak (K/L), pemerintah provinsi, kabupaten/kota, lembaga-lembaga nasional dan internasional, donor, pihak swasta, masyarakat sipil dan pihak pemangku kepentingan lainnya) melalui perjanjian Kesepakatan Bersama/Memorandum of Understanding (MoU), dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS); dan
- (8) Peningkatan pemantauan dan evaluasi kegiatan responsif gender secara berkala sebagai masukan dan umpan balik untuk penyusunan kebijakan serta keberlangsungan program kegiatan yang responsif gender.

### ***3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan Infrastruktur PUPR Tangguh Bencana***

Arah kebijakan dalam pengarusutamaan infrastruktur PUPR tangguh bencana ditempuh upaya untuk mengakomodasi kondisi kebencanaan di Indonesia yang ditujukan untuk menghasilkan infrastruktur PUPR yang tangguh dan bisa mengurangi risiko bencana serta dapat mengurangi jumlah kerusakan infrastruktur dan lingkungan, yang akan dilaksanakan melalui:

- (1) Penyediaan NSPK dan peningkatan implementasi standar keamanan bangunan infrastruktur termasuk didalamnya antisipasi terhadap bencana seperti pada gedung, jalan, jembatan bentang panjang, dan bendungan;
- (2) Menerapkan SNI/uniform building code keamanan struktural bangunan tahan gempa pada jalan dan jembatan, dengan kategori safety critical objective yang tetap harus dapat beroperasi meskipun terjadi bencana dengan kategori kuat, sebagai jalur evakuasi dan jalur logistik;
- (3) Pembangunan infrastruktur konektivitas dengan memperhatikan zona rawan bencana, sesuai kondisi hazard dan karakteristik wilayah rawan bencana;

- (4) Pembangunan infrastruktur transportasi yang sekaligus dapat difungsikan sebagai bangunan mitigasi bencana (misal: jalan yang dibangun sebagai tanggul di daerah pesisir untuk mengurangi dampak bencana banjir rob atau tsunami);
- (5) Penataan bangunan dan lingkungan permukiman yang berada di lokasi rawan bencana;
- (6) Pemeliharaan dan penataan lingkungan di sekitar daerah aliran sungai (DAS);
- (7) Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana dengan pengelolaan dan pemeliharaan yang melibatkan peran serta aktif masyarakat;
- (8) Pelaksanaan simulasi tanggap darurat secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- (9) Pengembangan teknologi ramah bencana pada setiap pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan;
- (10) Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data ketahanan kebencanaan infrastruktur PUPR;
- (11) Monitoring dan pemantauan ancaman bencana banjir dan kekeringan serta meningkatkan penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- (12) Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, longsor, banjir serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik;
- (13) Peningkatkan kecepatan respon/tanggap bencana untuk pemulihan, dan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur PUPR pasca bencana.

### **1.2.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Utama**

#### ***1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air Pengelolaan Air Tanah, Air Baku Berkelanjutan***

Arah kebijakan dalam pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan adalah percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi, peningkatan keterpaduan dalam penyediaan air minum dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan air baku. Strategi untuk percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi antara lain: (1) Penambahan kapasitas air baku dari bendungan dan sumber air lainnya didukung oleh pengamanan kualitas air; (2) Rehabilitasi dan peningkatan efisiensi infrastruktur penyedia air baku; (3) Pelaksanaan konservasi air tanah yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air baku serta didukung oleh penegakan peraturan pengambilan air tanah.

#### ***2. Arah Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Jalan***

Arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan jalan dirumuskan sebagai upaya untuk dijadikan acuan dalam pencapaian agenda pembangunan infrastruktur konektivitas 2020-2024.

Arah kebijakan penyelenggaraan jalan adalah Peningkatan Konektivitas Jalan Nasional, sementara strategi yang digunakan yakni Peningkatan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yang dijabarkan dalam (i) Preservasi jalan; (ii) Pembangunan jalan dan jembatan; (iii) Penataan jalan nasional di kawasan perkotaan; (iv) dan Pemenuhan Gap Funding melalui Skema Pembiayaan Alternatif.

#### ***3. Arah Kebijakan dan Strategi Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman***

Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman dalam mewujudkan smart living adalah peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan, dengan pengarusutamaan empat aspek dalam pelaksanaannya, yaitu perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan.

Kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah kebijakan tersebut, meliputi:

- a. Membangun sistem penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas, yang andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat return of investment, dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman.
- b. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua pihak dalam rangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman.
- c. Menerapkan inovasi terbaru dan/atau tepat guna dalam implementasi penyelenggaraan infrastruktur permukiman Kebijakan Peningkatan Akses Air Minum Layak dan Aman Kebijakan peningkatan akses air minum layak dan aman meliputi beberapa hal, yaitu:
  - a. Peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum;
  - b. Peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM;
  - c. Peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan;

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, yaitu:

- a. Meningkatkan cakupan akses air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM, termasuk pada kawasan rawan air dan pulau kecil terluar melalui penurunan kebocoran (Non-Revenue Water/NRW), pemanfaatan idle capacity, dan pembangunan kapasitas;
- b. Koordinasi intensif dalam rangka menjamin ketersediaan air baku;
- c. Menerapkan SPAM regional untuk mengatasi ketidakmerataan air baku;
- d. Menerapkan konsep bauran air baku domestik dalam mendukung ketahanan air baku;

- e. Menerapkan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)/Water Safety Plan (WSP) dalam menjamin pemenuhan kualitas air minum;
- f. Pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung efisiensi proses, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada kawasan air dan pulau kecil terluar;
- g. Mendorong percepatan serah terima dan pengelolaan aset SPAM terbangun kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, strategi peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM ialah:
  - a. Meningkatkan kapasitas SDM di tingkat pusat dan daerah;
  - b. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi daerah dalam penyelenggaraan SPAM;
  - c. Memperkuat penyusunan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi NSPK terkait penyelenggaraan SPAM;
  - d. Memperkuat peran stakeholders termasuk masyarakat dan Badan Usaha;
  - e. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antar kementerian/lembaga;
  - f. Menerapkan prinsip Good Governance untuk penyelenggaraan SPAM;
  - g. Pemanfaatan data dan sistem informasi dalam penyelenggaraan SPAM.

Lalu, strategi peningkatan kemampuan pendanaan dan komitmen stakeholder terkait pendanaan ialah:

- a. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pendanaan penyelenggara SPAM;
- b. Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan;
- c. Meningkatkan peran dan komitmen penyelenggara SPAM dalam alokasi pendanaan Kebijakan Peningkatan Akses Sanitasi Layak dan Aman dilakukan dengan:
  - i. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi;

- ii. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi;
- iii. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
- iv. Penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi;
- v. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

Adapun strategi peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah domestik baik melalui penyediaan sarana prasarana SPALD setempat maupun terpusat dan persampahan khususnya pada Kabupaten/Kota Prioritas;
- b. Fasilitasi pemerintah daerah dalam peningkatan utilisasi sarana prasarana terbangun;
- c. Fasilitasi penyiapan readiness criteria pada Kabupaten/Kota Prioritas;
- d. Mengembangkan dan penerapan kajian inovasi teknologi;
- e. Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi dengan platform database sanitasi lainnya;
- f. Penguatan monitoring dan evaluasi implementasi program sanitasi (pengelolaan dan berkelanjutan).

Selain itu, strategi peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan sanitasi ialah:

- a. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan, pengembangan sistem pengelolaan sanitasi;
- b. Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sanitasi.

Adapun strategi pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan sanitasi adalah:

- a. Penyusunan NSPK yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan sanitasi;
- b. Mendorong penguatan regulasi pengelolaan sanitasi di daerah.



Adapun strategi penguatan kelembagaan pengelolaan sanitasi adalah:

- a. Mendorong dan menjaga komitmen kepala daerah dan pemangku kepentingan lain dalam pengarusutamaan pembangunan sanitasi di daerah;
- b. Mendorong pembentukan dan penguatan institusi pengelola sanitasi di daerah;
- c. Mendorong pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola sanitasi ditingkat masyarakat;
- d. Mengembangkan dan mengkoordinasikan mekanisme serah terima aset sarana prasarana terbangun kepada daerah yang lebih efektif.

Adapun strategi pengembangan alternatif sumber pembiayaan adalah:

- a. Mendorong peningkatan pemulihan biaya (circular economy) dalam pengelolaan sanitasi;
- b. Sinkronisasi pemrograman pada berbagai sumber pendanaan untuk penyelenggaraan sanitasi;
- c. Mendorong kerjasama pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang sanitasi

## **B. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional**

Penyelenggaraan penataan ruang tahun 2015-2019 diarahkan untuk mewujudkan Nawa Cita terkait dengan pembangunan Indonesia dari pinggiran, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing 14 ekonomi, dan pengembangan tol laut, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau terluar, disparitas pembangunan antar wilayah dan kawasan, dan perubahan iklim.

Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, Rencana Detil Tata Ruang,

fasilitasi penyediaan peta skala 1:5.000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS. Pelaksanaan tugas dengan mekanisme dekonsentrasi yang telah berjalan akan dilanjutkan, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

### **C. Telaahan Renstra Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPU BMCK) Propinsi Jawa Tengah**

#### **Arah Kebijakan**

Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah :

- a. Melaksanakan peningkatan jalan dan pembangunan jalan serta penggantian jembatan utamanya pada ruas jalan alih status jalan Kab/Kota. Melaksanakan peningkatan kapasitas/pelebaran jalan akses dan penghubung antar obyek pariwisata, Jalan penghubung antar Pengembangan Wilayah, Jalan akses menuju kawasan industri terpadu dan perbatasan antar provinsi.
- b. Melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan agar tetap dalam kondisi permukaan baik dan pemeliharaan rutin jembatan dalam kondisi baik;
- c. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat untuk pembangunan SPAM Regional (Petanglong, Wosokusas dan Keburejo) secara bertahap;
- d. Melakukan pendekatan pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS;
- e. Melakukan dukungan untuk pembangunan system pengelolaan air limbah domestik;
- f. Memberikan bantuan teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD);
- g. Meningkatkan kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi

#### **Strategi**

Untuk melaksanakan strategi tersebut perlu didukung kebijakan yang bertujuan menunjang pencapaian visi dan misi Gubernur yakni dengan :

- a. Melakukan penanganan pelebaran jalan dengan menggunakan konstruksi beton, perkuatan tebing jalan, pembangunan saluran, perbaikan alinyemen horizontal

- dan vertikal serta penanganan pelebaran jembatan dengan tidak menutup pengembangan teknologi dan inovasi;
- b. Melakukan penanganan jalan dan jembatan untuk mempertahankan kondisi sesuai dengan tingkat kerusakan dan tingkat kemendesakan;
  - c. Membangun sistem layanan aman air minum perkotaan dan sanitasi dengan pendekatan regional;
  - d. Memenuhi kebutuhan aman air minum perdesaan;
  - e. Mendukung system layanan sanitasi layak;
  - f. Membangun system layanan persampahan dengan pendekatan regional;
  - g. Melakukan bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah;
  - h. Pembinaan dan pelatihan teknis pelaku jasa konstruksi.

#### **D. Telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang (DPUSDATARU) Provinsi Jawa Tengah**

##### **Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi merupakan kebijakan Pengelolaan SDA dan Penataan Ruang sebagai arahan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

1. Meningkatkan kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Meningkatkan layanan pemenuhan kebutuhan air baku Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Meningkatkan fungsi dan kondisi baik sungai Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
4. Menurunnya daerah genangan banjir Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Menciptakan tercapainya tertib ruang dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

## **Strategi**

Strategi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun mendatang meliputi :

1. Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan irigasi, air baku, sungai dan pantai Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembinaan, pemantauan & evaluasi kinerja dan kondisi sarana dan prasarana jaringan irigasi, air baku, sungai dan pantai;
3. Kerjasama dan manajemen aset dalam pengelolaan SDA;
4. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana jaringan irigasi, air baku Balai PSDA;
5. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air baku Balai PSDA;
6. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai dan pantai Balai PSDA Bodri Kuto dan Pemali Comal;
7. Pengendalian banjir dan pengelolaan peralatan;
8. Pemeliharaan darurat sarana dan prasarana sungai dan pantai Balai PSDA;
9. Penanganan banjir Balai PSDA;
10. Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang

### **III.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPUTR Kabupaten Pemalang**

Visi pembangunan Kabupaten Pemalang sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 - 2026 adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Pemalang Yang Adil, Makmur, Agamis Dan Ngangeni”***. Visi tersebut diwujudkan melalui 6 (Enam) misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban masyarakat
2. Mewujudkan penyelenggaraan terinata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong
4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan

5. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal
6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan

Dalam rangka Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam hal ini DPUTR mengampu dua Misi yaitu **Misi ke-4 (empat) dan ke-6 (enam)** yaitu **Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan dan Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.**

❖ **Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan perdesaan dan perkotaan. Kegiatan pembangunan perkotaan harus saling melengkapi dan saling terkait dengan wilayah perdesaan. Perubahan paradigma dalam pembangunan memandang desa sebagai basis potensial kegiatan ekonomi. Menjadikan desa sebagai pusat-pusat pembangunan dan motor utama penggerak roda perekonomian. Upaya keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan ditempuh melalui percepatan, peningkatan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa serta penataan kawasan perkotaan (Program Unggulan: DEDI, DESI).

Misi ke – 4 (empat) ini memiliki indikator tujuan yaitu :

- 1) Indeks Desa Membangun
- 2) Indeks ketimpangan antar wilayah

Dengan sasaran terwujudnya pengembangan kota.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

- Pendataan Bangunan dan Melaksanakan Perencanaan, Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi sesuai dengan program usulan daerah dan program yang tertuang dalam Renja.

❖ **Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan**

Misi ini ditujukan untuk mewujudkan infrastruktur yang mantap dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Misi ke-6 (enam) ini memiliki indikator tujuan yaitu Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), dengan sasarannya yaitu :

- 1) Meningkatnya cakupan universal akses
- 2) Meningkatnya konektivitas antar wilayah
- 3) Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air
- 4) Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan peningkatan dan perluasan sarana dan prasarana air minum.
- b. Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana air limbah, sarana prasarana persampahan dan drainase perkotaan.
- c. Melaksanakan kegiatan pembangunan jalan pada ruas ruas jalan yang belum terkoneksi
- d. Melaksanakan kegiatan peningkatan / rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan
- e. Penataan sumber daya manusia bidang SDA
- f. Modernisasi pengelolaan sistem data dan informasi Sumber Daya air
- g. Perencanaan berbasis spasial dan intergratif
- h. Optimalisasi organisasi Pengelola Jaringan Sumber Daya Air
- i. Pengembangan Pusat Pelayanan Guna Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Perkembangan wilayah yang sesuai dengan Perda RTRW
- j. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produk

**Tabel. III.1.  
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan DPUTR Tahun 2021-2026**

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
<b>MISI 4 : Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan</b>				
1.Mewujudkan pengembangan kota	Terselenggaranya bangunan gedung pemerintahan yang optimal dan sesuai regulasi	Pendataan Bangunan dan Melaksanakan Perencanaan, Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi sesuai dengan program usulan daerah dan program yang tertuang dalam Renja.	Optimalisasi Pengawasan Pembangunan Gedung melalui Rekomendasi PBG dan SLF	1. Program Penataan Bangunan Gedung 2. Program Penataan Bangunan dan lingkungannya 3. Program pengembangan Jasa Konstruksi
<b>MISI 6 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan</b>				
2.Meningkatkan cakupan universal akses air minum	Meningkatkan akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	Melaksanakan kegiatan peningkatan dan perluasan sarana dan prasarana air minum.	- Melaksanakan kegiatan peningkatan dan perluasan sarana dan prasarana air minum sejumlah 2.600 SR ( $\pm$ 13.000 jiwa) per tahun	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
3.Meningkatkan sanitasi lingkungan layak bagi masyarakat	Meningkatnya akses sanitasi layak bagi masyarakat	Melaksanakan kegiatan pembangunan sarana prasarana air limbah, sarana prasarana persampahan dan drainase perkotaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Melaksanakan kegiatan sarana prasarana air limbah domestik terpusat sejumlah 500 SR (<math>\pm</math> 2.500 jiwa) per tahun</li> <li>-Pembangunan dan Rehabilitasi sarana prasarana persampahan (TPS/TPST/TPS 3R/IPLT) sejumlah 5 unit per tahun</li> <li>-Pembangunan dan Rehabilitasi drainase perkotaan sepanjang 7.550 meter pertahun</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</li> <li>2. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</li> <li>3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li> </ol>



<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
4.Meningkatkan konektivitas jaringan jalan kabupaten	Meningkatnya konektivitas antar wilayah Meningkatnya kondisi jalan mantap	Melaksanakan kegiatan pembangunan jalan pada ruas ruas jalan yang belum terkoneksi	Melaksanakan kegiatan pembangunan jalan pada ruas ruas jalan yang belum terkoneksi	Program Penyelenggaraan Jalan
		Melaksanakan kegiatan peningkatan / rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan	Melaksanakan kegiatan peningkatan/rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin jalan sesuai daftar skala prioritas	

VISI : Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	Meningkatnya pelayanan sistem irigasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penataan sumber daya manusia bidang SDA</li> <li>2. Modernisasi pengelolaan sistem data dan informasi Sumber Daya air</li> <li>3. Perencanaan berbasis spasial dan intergratif</li> <li>4. Optimalisasi organisasi Pengelola Jaringan Sumber Daya Air</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keikutsertaan Diklat teknis pada Balai Diklat PUPR Wilayah V Yogyakarta</li> <li>2. Pemasangan Alat Pengukur otomatis dan Pembuatan aplikasi pemantau real time data hidrologi dan meteorologi</li> <li>3. Merencanakan Program / kegiatan berdasarkan survei kinerja jaringan Sumber daya Air dalam satu DAS / catchment</li> <li>4. Meningkatkan Kinerja Organisasi P3A dan memberdayakan masyarakat pemanfaat Sumber Daya Air dalam pengelolaannya</li> </ol>	Program Pengelolaan Sumber Daya Air ( Sda )

<b>VISI : Terwujudnya Kabupaten Pematang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
6.Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Pusat Pelayanan Guna Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan Perkembangan wilayah yang sesuai dengan Perda RTRW</li> <li>2. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian produk produk</li> </ol>	Pelaksanaan kegiatan penataan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

### III.2. Program dan Kegiatan

**Tabel III.2**  
**Rumusan Program dan Kegiatan DPUTR Tahun 2022 Dan Perkiraan Maju Tahun 2023**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	03				<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			107.377.043.000					345.500.000.000
						Indeks Reformasi Birokrasi	DPUTR	64,97				64,97	
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja DPUTR	DPUTR	64,97				64,97	
1	03	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	DPUTR	43,65	21.643.316.000			43,90	26.900.000.000
						Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	DPUTR	60,25				60,50	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	DPUTR	100%	2.000.000	DAU		100%	142.000.000
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	DPUTR	2 Jenis	2.000.000	DAU		4 Jenis	82.000.000
1	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	DPUTR	-	-	-		4 laporan	15.000.000
1	03	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan bulanan perkembangan kegiatan DPUTR yang disusun	DPUTR	-	-	-		12 laporan	45.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	03	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu</b>	DPUTR	100%	18.393.316.000	DAU		100%	17.926.695.000
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	DPUTR	158 ob	18.393.316.000	DAU		158 ob	17.904.695.000
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	DPUTR	-	-	DAU		19 orang	12.000.000
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	DPUTR	-	-	DAU		1 laporan	7.000.000
1	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran semester 1 dan 2 serta laporan inventarisasi BMD yang disusun	DPUTR	-	-	DAU		1 laporan	3.000.000
1	03	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi</b>	DPUTR	43,65 Indeks 60,25 nilai	32.000.000	DAU		100%	50.000.000
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	DPUTR	30 orang	32.000.000	DAU		30 orang	50.000.000
1	03	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi</b>	DPUTR	43,65 Indeks 60,25 nilai	283.525.000	DAU			580.805.000
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara instalasi listrik/penerangannya	DPUTR	9 unit	5.000.000	DAU		9 unit	37.000.000
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	DPUTR	6 jenis	9.800.000	DAU		4 jenis	70.000.000
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	DPUTR	-	-			3 jenis	20.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis makanan dan minuman yang dibeli	DPUTR	2 jenis	60.000.000	DAU		2 jenis	120.000.000
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	DPUTR	7 jenis	30.000.000	DAU		7 jenis	110.000.000
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang dibeli	DPUTR	2 jenis	10.500.000	DAU		2 eks	23.805.000
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	DPUTR	153 kali	109.975.000	DAU		153 keg	200.000.000
1	03	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan</b>	<b>DPUTR</b>	<b>100%</b>	<b>4.526.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>4.820.000.000</b>
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	DPUTR	-	-	DAU		1 unit	550.000.000
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jenis mebeleur yang dibeli	DPUTR	-	-	DAU		4 jenis	4.100.000.000
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	DPUTR	1 jenis	4.526.000	DAU		1 jenis	170.000.000
1	03	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>	<b>DPUTR</b>	<b>100%</b>	<b>2.529.154.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>2.520.000.000</b>
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	DPUTR	5 jenis	264.000.000	DAU		5 jenis	260.000.000
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli	DPUTR	28 jenis	70.000.000	DAU		32 jenis	110.000.000
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa pelayanan umum yang dibutuhkan	DPUTR	4 jenis	2.195.154.000	DAU		4 jenis	2.150.000.000
1	03	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>DPUTR</b>	<b>100%</b>	<b>398.795.000</b>	<b>DAU</b>		<b>100%</b>	<b>860.500.000</b>
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diservis dan berizin	DPUTR	122 unit	117.000.000	DAU		122 unit	200.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat yang terehabilitasi	DPUTR	18 unit	179.845.000	DAU		18 unit	180.000.000
1	03	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat yang terehabilitasi	DPUTR	-	-			75 unit	6.000.000
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	DPUTR	2 jenis	44.400.000	DAU		2 jenis	49.500.000
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	DPUTR	2 unit	57.550.000	DAU		2 unit	260.000.000
1	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	DPUTR	-	-	DAU		2 unit	165.000.000
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik</b>	<b>DPUTR</b>	<b>68%</b>	<b>3.702.039.000</b>	<b>DAU, DAK</b>		<b>68%</b>	<b>23.000.000.000</b>
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Capaian Pengaman Pantai dan Jaringan Sungai Yang dikelola</b>	<b>DPUTR</b>	<b>30%</b>	<b>831.705.000</b>	<b>DAU</b>		<b>30%</b>	<b>9.115.300.000</b>
1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen kajian kawasan terdampak genangan pasang/rob yang disusun	DPUTR	-	-	DAU		4 dok	324.000.000
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dan aplikasi yang disusun	DPUTR	3 dok	31.705.000	DAU		3 dok	162.000.000
1	03	02	2.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung yang Dibangun	DPUTR	-	-	DAU		1 unit	162.000.000
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang terbing yang dibangun	DPUTR	700 m	200.000.000	DAU		700 m	648.150.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	03	02	2.01	16	Pembangunan Check Dam	Panjang bangunan chekdam yang dibangun	DPUTR	-	-	DAU		30 m	162.000.000
1	03	02	2.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang bangunan pantai yang dibangun	DPUTR	-	-	DAU		50 m	162.000.000
1	03	02	2.01	19	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah pemasangan instalasi pantau debit sungai yang dibangun	DPUTR	-	-	DAU		4 unit	121.500.000
1	03	02	2.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi	DPUTR	-	-	DAU		3 bh	162.000.000
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi	DPUTR	-	-	DAU		100 m	405.500.000
1	03	02	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi	DPUTR	-	-	DAU		3000 m	2.025.300.000
1	03	02	2.01	34	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang ditingkatkan	DPUTR	-	-	DAU		50 m	162.000.000
1	03	02	2.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang ditingkatkan	DPUTR	-	-	DAU		100 m	324.600.000
1	03	02	2.01	43	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah bangunan pengaman pantai yang ditingkatkan	DPUTR	-	-	DAU		1 bh	162.000.000
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi	DPUTR	11000 m	600.000.000	DAU		11000 m	3.645.650.000
1	03	02	2.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat yang diselenggarakan	DPUTR	-	-	DAU		1 keg	162.000.000
1	03	02	2.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang sungai yang dipelihara	DPUTR	-	-	DAU		28000 m	324.600.000
1	03	02	2.02		<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Capaian Jaringan Irigasi Yang Dikelola</b>	DPUTR	70%	2.870.334.000	DAU, DAK		90%	13.884.700.000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan Indeks Kinerja Sistem Irigasi	DPUTR	3 dok	218.295.000	DAU		3 dok	243.000.000
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	DPUTR	-	-	DAU		100 ha	243.000.000
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah DI yang direhabilitasi	DPUTR	20 DI	2.452.039.000	DAK		20 DI	4.050.700.000
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi yang dipelihara	DPUTR	91 DI	200.000.000	DAU		91 DI	9.187.000.000
1	03	02	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi	DPUTR	-	-	DAU		1 keg	161.000.000
1	03	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan pedesaan</b>	DPUTR	88%	3.229.794.000	DAU, DAK		89%	15.000.000.000
1	03	03	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan (akses air minum)</b>	DPUTR	50011 SR	3.229.794.000	DAU, DAK		2300	15.000.000.000
1	03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah bangunan/Sambungan Rumah yang dibangun	DPUTR	4008 SR/unit	660.000.000	DAU		1275 SR/unit	11.250.000.000
						Panjang jaringan pipa sumber air yang dibangun		51005 m				31005 m	
1	03	03	2.01	06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah bangunan/Sambungan Rumah yang ditingkatkan	DPUTR	993 SR/unit	2.639.794.000	DAU, DAK		1025 SR/unit	3.750.000.000
						Panjang jaringan air bersih yang ditingkatkan		9027 m				19027 m	
1	03	04			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase sarana prasarana persampahan sesuai standar</b>	DPUTR	20,62%	200.000.000	DAU			11.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras persampahan sesuai standar yang dibangun dan direhabilitasi	DPUTR	7 Unit	200.000.000	DAU		11.000.000.000	
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/TPS/SPA/TPS3R yang dibangun	DPUTR	1 unit	100.000.000	DAU	1 unit	7.500.000.000	
1	03	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/TPS/SPA/TPS3R yang direhabilitasi	DPUTR	6 unit	100.000.000	DAU	4 unit	3.500.000.000	
1	03	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik</b>	DPUTR	93%	5.374.694.000	DAU, DAK	94%	2.000.000.000	
1	03	05	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</b>	DPUTR	12 Unit	5.374.694.000	DAU, DAK	6 unit	2.000.000.000	
1	03	05	2.01	05	Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang ditingkatkan	DPUTR	-	-	DAU	5 unit	1.250.000.000	
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun	DPUTR	9 unit	5.374.694.000	DAU, DAK	1 unit	750.000.000	
						Jumlah pengelolaan sampah yang dibangun		1 unit					
1	03	06			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik</b>	DPUTR	74%	410.000.000	DAU	75%	10.000.000.000	
1	03	06	2.01		<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan direhabilitasi</b>	DPUTR	11555 m	410.000.000	DAU		10.000.000.000	
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	DPUTR	-			300 m	1.500.000.000	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang direhabilitasi/dipelihara	DPUTR	8333 m	250.000.000	DAU		830 m	7.600.000.000
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang dipelihara	DPUTR	3872 m3	160.000.000	DAU		2000 m	900.000.000
1	03	08			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik Sesuai Tertib Administrasi Tata Bangunan</b>	DPUTR	50%	6.355.000.000	DAU		50%	15.000.000.000
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah gedung perkantoran yang dibangun (lanjutan)	DPUTR	30 rekom 3 unit	6.355.000.000	DAU		4 unit	15.000.000.000
						Jumlah gedung perkantoran yang dibangun (lanjutan)						30 rekom	
						Jumlah dokumen rekomendasi penyelenggaraan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)						20 rekom	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah dokumen pendataan Bangunan Gedung Negara	DPUTR	1 dok	100.000.000	DAU		30 dok	300.000.000
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan bangunan gedung pemerintah yang disusun	DPUTR	5 dok	5.751.000.000	DAU			13.700.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
						Jumlah dokumen perencanaan bangunan gedung pemerintah yang disusun		2 dok					
						Jumlah gedung perkantoran yang dibangun (lanjutan)		4 unit					
						Jumlah gedung perkantoran yang direhabilitasi		1 unit					
1	03	08	2.01	05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan perkembangan progres pembangunan yang diselenggarakan	DPUTR	-	-				50.000.000
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan yang disusun	DPUTR	3 dok	504.000.000	DAU		3 dok	950.000.000
						Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		3 dok				3 dok	
						Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi		3 unit				3 unit	
1	03	09			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya dengan peraturan dan perencanaan tata bangunan</b>	DPUTR	20%	225.000.000	DAU		20%	4.000.000.000
1	03	09	2.01		<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kawasan yang dibangun/ditata</b>	DPUTR	1 kawasan	225.000.000	DAU		1 kawasan	4.000.000.000
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungannya yang dibangun dalam kawasan yang terencana	DPUTR	1 unit	225.000.000	DAU		2 unit	4.000.000.000
1	03	10			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap</b>	DPUTR	65%	65.887.200.000	DAU, DAK		69,53	237.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Prosentase Kondisi Jalan dalam Kondisi Mantap	DPUTR	66,64%	65.887.200.00	DAU, DAK		69,53%	237.000.000.000
						Prosentase Kondisi Jembatan dalam Kondisi Mantap		100%				100%	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan penyelenggaraan jalan dan jembatan yang disusun	DPUTR	-	-	DAU		10 dok	1.000.000.000
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	DPUTR	-	-	DAU		1 paket	3.000.000.000
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Panjang Leger Jalan yang dibuat	DPUTR	-	-	DAU		100 km	500.000.000
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Survey	DPUTR	2 dok	720.000.000	DAU		2 dok	750.000.000
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang di bangun	DPUTR	-	-	DAU		5 km	22.500.000.000
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang dilebarkan	DPUTR	4000 m3	2.140.000.000	DAU		21 km	53.250.000.000
1	03	10	2.01	07	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang ditambah lajur	DPUTR	-	-	DAU		2 km	16.000.000.000
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Rekonstruksi Jalan Kabupaten	DPUTR	60000 m2	30.935.200.000	DAU, DAK		12 km	33.000.000.000
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang di Rehabilitasi	DPUTR	-	-	DAU		61,15 km	19.500.000.000
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang di Pelihara Secara Berkala	DPUTR	-	-	DAU		43 km	61.150.000.000
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	DPUTR	8000 m	31.702.000.000	DAU		8000 m	4.000.000.000
						Panjang jalan yang dipelihara secara rutin (swakelola + 8 upji)		169,49 k m		DAU		169,49 km	10.000.000.000
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	DPUTR	3 unit	390.000.000	DAU			
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	DPUTR	-	-	DAU		1 unit	5.000.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	03	10	2.01	17	Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan Kabupaten yang dilebarkan	DPUTR	-	-	DAU		5 unit	3.000.000.000
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang di Rehabilitasi	DPUTR	-	-	DAU		5 unit	1.000.000.000
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang di Pelihara	DPUTR	-	-	DAU		5 unit	500.000.000
1	03	10	2.01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang di Pelihara Secara Berkala	DPUTR	-	-	DAU		1 unit	1.000.000.000
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah Jalan/Jembatan yang di Tangani	DPUTR	-	-	DAU		2 pkt	1.000.000.000
1	03	10	2.01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Jalan/Jembatan	DPUTR	-	-	DAU		1 pkt	350.000.000
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Pengawasan Teknis Jalan/Jembatan	DPUTR	-	-	DAU		10 pkt	500.000.000
1	03	11			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi</b>	DPUTR	10%	80.000.000	DAU		10%	600.000.000
1	03	11	2.01		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Tenaga Terampil konstruksi yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat</b>	DPUTR	1 dok 10 keg 45 org	80.000.000	DAU		50 org	120.000.000
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil yang mengikuti pelatihan	DPUTR	-	-			50 org	60.000.000
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil konstruksi yang Bersertifikat	DPUTR	-	-			50 org	60.000.000
1	03	11	2.01	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi yang disusun	DPUTR	1 dok	80.000.000	DAU			-
1	03	11	2.02		<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah jenis informasi tingkat kabupaten pada sistem informasi jasa konstruksi (SIPJAKI)</b>	DPUTR	-	-			1	100.000.000
1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Analisa Harga	DPUTR	-	-			1 dok	100.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
						Satuan Pekerjaan Konstruksi yang disusun							
1	03	11	2.03		<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>	<b>Jumlah pemantauan dan evaluasi penerbitan IUJK yang diterbitkan</b>	DPUTR	-	-			15 keg	100.000.000
						<b>Jumlah Naskah Akademik/Peraturan terkait Penyelenggaraan IUJK yang tersusun</b>		-	-			1 dok	
1	03	11	2.03	01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan Naskah Akademik Perbup Pelaksanaan IUJK yang disusun	DPUTR	-	-			1 dok	80.000.000
1	03	11	2.03	05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah pemantauan dan evaluasi penerbitan IUJK yang diterbitkan	DPUTR	-	-			15 keg	20.000.000
1	03	11	2.04		<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>Jumlah pelatihan tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	DPUTR	-	-			2 keg	280.000.000
						<b>Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha Jasa Konstruksi</b>		-	-				
						<b>Jumlah alat pengelasan konstruksi yang disediakan</b>		-	-				
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta pelatihan terkait tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	DPUTR	-	-			50 org	200.000.000
						PNS/ staf yang terlatih tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan,			-			5 org	30.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
						dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi							
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengadaan alat pengetesan konstruksi	DPUTR	-	-			1	50.000.000
1	03	12			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentase pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah</b>	DPUTR	100%	200.000.000	DAU			1.000.000.000
1	03	12	2.01		<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peraturan rencana detail tata ruang yang diterbitkan</b>	DPUTR	100%	30.000.000	DAU			322.500.000
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Subtansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen persetujuan substansi RDTR Kawasan Perkotaan yang disusun	DPUTR		-				129.000.000
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	DPUTR	1 dok	30.000.000	DAU			129.000.000
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan penataan ruang	DPUTR		-				64.500.000
1	03	12	2.02		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan tata ruang yang disusun</b>	DPUTR	100%	100.000.000	DAU	100%		452.000.000
1	03	12	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen materi teknis evaluasi RTRW Kab. Pemalang yang disusun	DPUTR	-	-				226.000.000
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen materi teknis RDTR Kawasan Perkotaan Comal yang disusun	DPUTR	1 dok	100.000.000	DAU			226.000.000
1	03	12	2.03		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Dokumen ITR yang diterbitkan</b>	DPUTR	100%	-			100%	161.250.000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	tersedianya layanan ITR bagi masyarakat	DPUTR	-	-			12 bln	96.750.000
						Terselenggaranya koordinasi penataan ruang daerah	-	-	-			4 keg	-
						Terselenggaranya Konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Dunia Usaha terkait penataan ruang daerah	-	-	-			12 bln	-
1	03	12	2.03	01	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedia sarana Informasi dan pelayanan bidang penataan ruang	DPUTR	-	-			1 bh	64.500.000
1	03	12	2.04		<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase tersusunnya dokumen pedoman teknis pengendalian pemanfaatan ruang</b>	DPUTR	100%	70.000.000	DAU		100%	64.250.000
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya kajian evaluasi pemanfaatan lahan di Kabupaten Pemalang	DPUTR	1 dok	70.000.000	DAU		1 bh	64.250.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **IV.1. Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dan penjabaran Renstra 2021 – 2026 sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi dan Nasional baik jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, DPUTR Tahun 2022 mengampu 10 program dan 20 Kegiatan serta 43 sub kegiatan untuk menunjang tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang.

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**TABEL: IV.1**

**Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang**

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			107.377.043.000		345.500.000.000	DPUTR
				Indeks Reformasi Birokrasi	64,97		64,97		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja DPUTR	64,97		64,97		
	Meningkatkan pelayanan kinerja DPUTR	Meningkatnya pelayanan kinerja DPUTR	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi	43,65	21.643.316.000	43,90	26.900.000.000	DPUTR
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	60,25		60,50		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu	100%	2.000.000	100%	142.000.000	DPUTR
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	2 Jenis	2.000.000	4 Jenis	82.000.000	DPUTR
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	-	-	4 laporan	15.000.000	DPUTR
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan bulanan perkembangan kegiatan DPUTR yang disusun	-	-	12 laporan	45.000.000	DPUTR

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>18.393.316.000</b>	<b>100%</b>	<b>17.926.695.000</b>	<b>DPUTR</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	158 ob	18.393.316.000	158 ob	17.904.695.000	DPUTR
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	-	-	19 orang	12.000.000	DPUTR
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	-	-	1 laporan	7.000.000	DPUTR
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran semester 1 dan 2 serta laporan inventarisasi BMD yang disusun	-	-	1 laporan	3.000.000	DPUTR
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi</b>		<b>32.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>DPUTR</b>
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	30 orang	32.000.000	30 orang	50.000.000	DPUTR
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang dipenuhi</b>		<b>283.525.000</b>		<b>580.805.000</b>	<b>DPUTR</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara instalasi listrik/penerangannya	9 unit	5.000.000	9 unit	37.000.000	DPUTR
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	6 jenis	9.800.000	4 jenis	70.000.000	DPUTR
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	-	-	3 jenis	20.000.000	DPUTR
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis makanan dan minuman yang dibeli	2 jenis	60.000.000	2 jenis	120.000.000	DPUTR

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak dan digandakan	7 jenis	30.000.000	7 jenis	110.000.000	DPUTR
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang dibeli	2 jenis	10.500.000	2 eks	23.805.000	DPUTR
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	153 kali	109.975.000	153 keg	200.000.000	DPUTR
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan</b>	<b>100%</b>	<b>4.526.000</b>	<b>100%</b>	<b>4.820.000.000</b>	<b>DPUTR</b>
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	-	-	1 unit	550.000.000	DPUTR
			Pengadaan Mebel	Jenis mebeleur yang dibeli	-	-	4 jenis	4.100.000.000	DPUTR
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	1 jenis	4.526.000	1 jenis	170.000.000	DPUTR
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia</b>		<b>2.529.154.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.520.000.000</b>	<b>DPUTR</b>
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	5 jenis	264.000.000	5 jenis	260.000.000	DPUTR
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli	28 jenis	70.000.000	32 jenis	110.000.000	DPUTR
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa pelayanan umum yang dibutuhkan	4 jenis	2.195.154.000	4 jenis	2.150.000.000	DPUTR
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milik daerah yang dipelihara</b>	<b>100%</b>	<b>398.795.000</b>	<b>100%</b>	<b>860.500.000</b>	<b>DPUTR</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diservis dan berizin	122 unit	117.000.000	122 unit	200.000.000	DPUTR

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat yang terehabilitasi	18 unit	179.845.000	18 unit	180.000.000	DPUTR
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat yang terehabilitasi	-	-	75 unit	6.000.000	DPUTR
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	2 jenis	44.400.000	2 jenis	49.500.000	DPUTR
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	2 unit	57.550.000	2 unit	260.000.000	DPUTR
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	-	-	2 unit	165.000.000	DPUTR
	<b>Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air</b>	<b>Meningkatnya pengelolaan sistem irigasi</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik</b>		<b>3.702.039.000</b>	<b>68%</b>	<b>23.000.000.000</b>	<b>DPUTR</b>
			<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Capaian Pengaman Pantai dan Jaringan Sungai Yang dikelola</b>		<b>831.705.000</b>	<b>30%</b>	<b>9.115.300.000</b>	<b>DPUTR</b>
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen kajian kawasan terdampak genangan pasang/rob yang disusun	-	-	4 dok	324.000.000	DPUTR
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dan aplikasi yang disusun	3 dok	31.705.000	3 dok	162.000.000	DPUTR
			Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung yang Dibangun	-	-	1 unit	162.000.000	DPUTR
			Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang terbing yang dibangun	700 m	200.000.000	700 m	648.150.000	DPUTR

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
			Pembangunan Check Dam	Panjang bangunan chekdam yang dibangun	-	-	30 m	162.000.000	DPUTR
			Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang bangunan pantai yang dibangun	-	-	50 m	162.000.000	DPUTR
			Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah pemasangan instalasi pantau debit sungai yang dibangun	-	-	4 unit	121.500.000	DPUTR
			Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi	-	-	3 bh	162.000.000	DPUTR
			Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi	-	-	100 m	405.500.000	DPUTR
			Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang direhabilitasi	-	-	3000 m	2.025.300.000	DPUTR
			Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang ditingkatkan	-	-	50 m	162.000.000	DPUTR
			Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang ditingkatkan	-	-	100 m	324.600.000	DPUTR
			Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah bangunan pengaman pantai yang ditingkatkan	-	-	1 bh	162.000.000	DPUTR
			Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang sungai yang dinormalisasi	11000 m	600.000.000	11000 m	3.645.650.000	DPUTR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat yang diselenggarakan	-	-	1 keg	162.000.000	DPUTR
			Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang sungai yang dipelihara	-	-	28000 m	324.600.000	DPUTR
			<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Capaian Jaringan Irigasi Yang Dikelola</b>		<b>2.870.334.000</b>	<b>90%</b>	<b>13.884.700.000</b>	<b>DPUTR</b>

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan teknis dan Indeks Kinerja Sistem Irigasi	3 dok	218.295.000	3 dok	243.000.000	DPUTR
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	-	-	100 ha	243.000.000	DPUTR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah DI yang direhabilitasi	20 DI	2.452.039.000	20 DI	4.050.700.000	DPUTR
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi yang dipelihara	91 DI	200.000.000	91 DI	9.187.000.000	DPUTR
			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi	-	-	1 keg	161.000.000	DPUTR
	<b>Meningkatkan cakupan universal akses air minum</b>	<b>Meningkatkan akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan pedesaan</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan pedesaan</b>	<b>88%</b>	<b>3.229.794.000</b>	<b>89%</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>DPUTR</b>
			<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan rumah tangga yang mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan (akses air minum)</b>		<b>3.229.794.000</b>	<b>2300</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>DPUTR</b>
			Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Jumlah bangunan/Sambungan Rumah yang dibangun	4008 SR/unit	660.000.000	1275 SR/unit	11.250.000.000	DPUTR
				Panjang jaringan pipa sumber air yang dibangun	51005 m		31005 m		DPUTR
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Pedesaan	Jumlah bangunan/Sambungan Rumah yang ditingkatkan	993 SR/unit	2.639.794.000	1025 SR/unit	3.750.000.000	DPUTR
				Panjang jaringan air bersih yang ditingkatkan	9027 m		19027 m		DPUTR



No.	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
	Meningkatkan sanitasi lingkungan layak bagi masyarakat	Meningkatnya akses sanitasi lingkungan layak bagi masyarakat	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase sarana prasarana persampahan sesuai standar	20,62%	200.000.000		11.000.000.000	DPUTR
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras persampahan sesuai standar yang dibangun dan direhabilitasi		200.000.000		11.000.000.000	DPUTR
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/TPS/SPA/TPS3R yang dibangun	1 unit	100.000.000	1 unit	7.500.000.000	DPUTR
			Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/TPS/SPA/TPS3R yang direhabilitasi	6 unit	100.000.000	4 unit	3.500.000.000	DPUTR
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	93%	5.374.694.000	94%	2.000.000.000	DPUTR
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		5.374.694.000	6 unit	2.000.000.000	DPUTR
			Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang ditingkatkan	-	-	5 unit	1.250.000.000	DPUTR
			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang dibangun	9 unit	5.374.694.000	1 unit	750.000.000	DPUTR
				Jumlah pengelolaan sampah yang dibangun	1 unit				DPUTR
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	74%	410.000.000	75%	10.000.000.000	DPUTR

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
			<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan direhabilitasi</b>		<b>410.000.000</b>		<b>10.000.000.000</b>	<b>DPUTR</b>
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun			300 m	1.500.000.000	DPUTR
			Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang direhabilitasi/dipelihara	8333 m	250.000.000	830 m	7.600.000.000	DPUTR
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang dipelihara	3872 m3	160.000.000	2000 m	900.000.000	DPUTR
	<b>Terwujudnya pengembangan Kota</b>	<b>Terselenggaranya bangunan gedung pemerintahan yang optimal dan sesuai regulasi</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik Sesuai Tertib Administrasi Tata Bangunan</b>	<b>50%</b>	<b>6.355.000.000</b>	<b>50%</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>DPUTR</b>
			<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	<b>Jumlah gedung perkantoran yang dibangun (lanjutan)</b>		<b>6.355.000.000</b>	4 unit	<b>15.000.000.000</b>	<b>DPUTR</b>
				<b>Jumlah gedung perkantoran yang dibangun (lanjutan)</b>			30 rekom		<b>DPUTR</b>
				<b>Jumlah dokumen rekomendasi penyelenggaraan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)</b>			20 rekom		<b>DPUTR</b>
			Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran	Jumlah dokumen pendataan Bangunan Gedung Negara	1 dok	100.000.000	30 dok	300.000.000	DPUTR

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
			Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG						
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan bangunan gedung pemerintah yang disusun	5 dok	5.751.000.000		13.700.000.000	DPUTR
				Jumlah dokumen perencanaan bangunan gedung pemerintah yang disusun	2 dok				DPUTR
				Jumlah gedung perkantoran yang dibangun (lanjutan)	4 unit				DPUTR
				Jumlah gedung perkantoran yang direhabilitasi	1 unit				DPUTR
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaporan perkembangan progres pembangunan yang diselenggarakan	-	-		50.000.000	DPUTR
			Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan yang disusun	3 dok	504.000.000	3 dok	950.000.000	DPUTR
				Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	3 dok		3 dok		DPUTR
				Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	3 unit		3 unit		DPUTR
			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya dengan peraturan dan perencanaan tata bangunan</b>	<b>20%</b>	<b>225.000.000</b>	<b>20%</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>DPUTR</b>
			<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kawasan yang dibangun/ditata</b>		<b>225.000.000</b>	<b>1 kawasan</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>DPUTR</b>

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan dan lingkungannya yang dibangun dalam kawasan yang terencana	1 unit	225.000.000	2 unit	4.000.000.000	DPUTR
			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi</b>		<b>80.000.000</b>	<b>10%</b>	<b>600.000.000</b>	<b>DPUTR</b>
			<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Tenaga Terampil konstruksi yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat</b>		<b>80.000.000</b>	<b>50 org</b>	<b>120.000.000</b>	<b>DPUTR</b>
			Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil yang mengikuti pelatihan		-	50 org	60.000.000	DPUTR
			Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil konstruksi yang Bersertifikat		-	50 org	60.000.000	DPUTR
			Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi yang disusun	1 dok	80.000.000		-	DPUTR
			<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah jenis informasi tingkat kabupaten pada sistem informasi jasa konstruksi (SIPJAKI)</b>	-	-	<b>1</b>	<b>100.000.000</b>	<b>DPUTR</b>
			Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi yang disusun	-	-	1 dok	100.000.000	DPUTR
			<b>Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)</b>	<b>Jumlah pemantauan dan evaluasi penerbitan IUJK yang diterbitkan</b>	-	-	<b>15 keg</b>	<b>100.000.000</b>	<b>DPUTR</b>
				<b>Jumlah Naskah Akademik/Peraturan terkait Penyelenggaraan IUJK yang tersusun</b>	-	-	<b>1 dok</b>		<b>DPUTR</b>
			Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan Naskah Akademik Perbup	-	-	1 dok	80.000.000	DPUTR

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
				Pelaksanaan IUJK yang disusun					
			Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah pemantauan dan evaluasi penerbitan IUJK yang diterbitkan	-	-	15 keg	20.000.000	DPUTR
			<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	<b>Jumlah pelatihan tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>	-	-	<b>2 keg</b>	<b>280.000.000</b>	<b>DPUTR</b>
				<b>Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha Jasa Konstruksi</b>	-	-	-	-	<b>DPUTR</b>
				<b>Jumlah alat pengetesan konstruksi yang disediakan</b>	-	-	-	-	<b>DPUTR</b>
			Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah peserta pelatihan terkait tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-	50 org	200.000.000	DPUTR
				PNS/ staf yang terlatih tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			5 org	30.000.000	DPUTR
			Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengadaan alat pengetesan konstruksi			1	50.000.000	DPUTR
	<b>Meningkatkan konektivitas antar wilayah</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap</b>		<b>65.887.200.000</b>	<b>69,53</b>	<b>237.000.000.000</b>	<b>DPUTR</b>
		<b>Meningkatnya konektivitas</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Kondisi Jalan dalam Kondisi Mantap</b>		65.887.200.00	69,53	237.000.000.000	DPUTR

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
		antar wilayah							
		Meningkatnya kondisi jalan mantap		Prosentase Kondisi Jembatan dalam Kondisi Mantap			100%		DPUTR
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan penyelenggaraan jalan dan jembatan yang disusun	-	-	10 dok	1.000.000.000	DPUTR
			Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	-	-	1 paket	3.000.000.000	DPUTR
			Pengelolaan Leger Jalan	Panjang Leger Jalan yang dibuat	-	-	100 km	500.000.000	DPUTR
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Survey	2 dok	720.000.000	2 dok	750.000.000	DPUTR
			Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun	-	-	5 km	22.500.000.000	DPUTR
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang dilebarkan	4000 m3	2.140.000.000	21 km	53.250.000.000	DPUTR
			Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang ditambah lajur	-	-	2 km	16.000.000.000	DPUTR
			Rekonstruksi Jalan	Panjang Rekonstruksi Jalan Kabupaten	60000 m2	30.935.200.000	12 km	33.000.000.000	DPUTR
			Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang di Rehabilitasi	-	-	61,15 km	19.500.000.000	DPUTR
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang di Pelihara Secara Berkala	-	-	43 km	61.150.000.000	DPUTR
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara secara rutin	8000 m	31.702.000.000	8000 m	4.000.000.000	DPUTR
				Panjang jalan yang dipelihara secara rutin (swakelola + 8 upji)	169,49 km	-	169,49 km	10.000.000.000	DPUTR
			Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun	3 unit	390.000.000	-	-	DPUTR
			Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	-	-	1 unit	5.000.000.000	DPUTR

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
			Pelebaran Jembatan	Jumlah Jembatan Kabupaten yang dilebarkan	-	-	5 unit	3.000.000.000	DPUTR
			Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang di Rehabilitasi	-	-	5 unit	1.000.000.000	DPUTR
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang di Pelihara	-	-	5 unit	500.000.000	DPUTR
			Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang di Pelihara Secara Berkala	-	-	1 unit	1.000.000.000	DPUTR
			Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jumlah Jalan/Jembatan yang di Tangani	-	-	2 pkt	1.000.000.000	DPUTR
			Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Jalan/Jembatan	-	-	1 pkt	350.000.000	DPUTR
			Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Pengawasan Teknis Jalan/Jembatan	-	-	10 pkt	500.000.000	DPUTR
	<b>Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang</b>	<b>Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Persentase pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah</b>		<b>200.000.000</b>		<b>1.000.000.000</b>	<b>DPUTR</b>
			<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Peraturan rencana detail tata ruang yang diterbitkan</b>		<b>30.000.000</b>		<b>322.500.000</b>	<b>DPUTR</b>
			Pelaksanaan Persetujuan Subtansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen persetujuan substansi RDTR Kawasan Perkotaan yang disusun		-		129.000.000	DPUTR
			Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	1 dok	30.000.000		129.000.000	DPUTR
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi kebijakan penataan ruang		-		64.500.000	DPUTR

No.	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana tahun 2022 dan 2023				Lokasi
					Target Kinerja	Rp.	Target Kinerja	Rp.	
			<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan tata ruang yang disusun</b>		<b>100.000.000</b>		<b>452.000.000</b>	<b>DPUTR</b>
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen materi teknis evaluasi RTRW Kab. Pemalang yang disusun		-		226.000.000	DPUTR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen materi teknis RDTRK Kawasan Perkotaan Comal yang disusun	<b>1 dok</b>	100.000.000		226.000.000	DPUTR
			<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Dokumen ITR yang diterbitkan</b>		-	<b>100%</b>	<b>161.250.000</b>	<b>DPUTR</b>
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	tersedianya layanan ITR bagi masyarakat		-	12 bln	96.750.000	DPUTR
				Terselenggaranya koordinasi penataan ruang daerah		-	4 keg	-	DPUTR
				Terselenggaranya Konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Dunia Usaha terkait penataan ruang daerah		-	12 bln	-	DPUTR
			Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedia sarana Informasi dan pelayanan bidang penataan ruang		-	1 bh	64.500.000	DPUTR
			<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase tersusunnya dokumen pedoman teknis pengendalian pemanfaatan ruang</b>		<b>70.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>64.250.000</b>	<b>DPUTR</b>
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya kajian evaluasi pemanfaatan lahan di Kabupaten Pemalang	1 dok	70.000.000	1 bh	64.250.000	DPUTR



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang tahun 2022 ini disusun dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kerja tahunan untuk menjamin keterkaitan, konsistensi dan menjaga sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan serta merupakan dokumen perencanaan taktis, strategis dinas yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang berpedoman kepada visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih tertuang pada RKPD Kab Pemalang tahun 2022.

Dokumen ini berisi program, kegiatan, sub kegiatan dengan alokasi dana indikatif yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu. pagu indikatif ini disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan masyarakat.

Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dimungkinkan akan terjadi dinamika dan perkembangan pembangunan yang harus diakomodir, oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2022 yang akan terwujud dalam Perubahan Rencana Kerja DPUTR Tahun 2022.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang tahun 2022 dapat kami susun dengan harapan rencana kerja ini bisa menjadi pedoman serta memberikan dorongan/motivasi dalam pencapaian sasaran kinerja pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga dapat mewujudkan Infrastruktur tangguh, mandiri, berdaya saing dan sejahtera.